

Model Pengembangan  
**PARIWISATA  
BERKELANJUTAN**

**BUR TELEGE DAN KEARIFAN LOKAL  
MASYARAKAT GAYO**

Ekowisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi alternatif yang sedang berkembang saat ini. Dengan cara mengintegrasikan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi sebagai satu kesatuan ekowisata dalam pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat lokal. Akibatnya, kawasan hutan lindung pun 'disunglap' menjadi atraksi wisata.

Dengan harapan transformasi fungsi hutan kepada ekowisata berdampak positif terhadap ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya masyarakat. Namun demikian, ternyata sebagian wilayah hutan mengalami degradasi dan menimbulkan persoalan sosial dan budaya akibat pengembangan pariwisata.

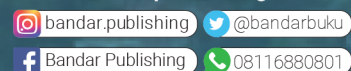
Berbeda dengan dengan masyarakat Gayo di kawasan hutan lindung Bur Telege, mereka malah mampu mengembangkan ekowisata Bur Telege yang pro ekonomi hijau dan sesuai dengan pilar pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan modal sosial yang mereka miliki.

Buku ini mencakup konsep dan teori mengenai ekowisata dan ekonomi hijau serta praktik-praktik pengembangan ekowisata berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat Gayo Aceh Tengah.

Oleh sebab itu, kami menyakini bahwa buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan pengalaman masyarakat dalam mentransformasi hutan lindung sebagai ekowisata hijau yang memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan, sosial dan budaya masyarakat. Bahkan keberadaan ekowisata telah memperkuat eksistensi unsur-unsur tersebut.



Lamgugop, Syiah Kuala  
Banda Aceh, Provinsi Aceh  
Email. bandar.publishing@gmail.com  
[www.bandarpublishing.com](http://www.bandarpublishing.com)



Model Pengembangan  
**PARIWISATA  
BERKELANJUTAN**

**BUR TELEGE DAN KEARIFAN LOKAL  
MASYARAKAT GAYO**



**Dr. Suadi Zainal, M.Si  
Dr. Nirzalin, M.Si  
Fakhrurrazi, M.Si**

Dr. Suadi Zainal, M.Si - Dr. Nirzalin, M.Si - Fakhrurrazi, M.Si

Model Pengembangan **PARIWISATA BERKELANJUTAN**

*Model*

**Pengembangan  
Pariwisata Berkelanjutan**

**Bur Telege dan Kearifan Lokal Masyarakat Gayo**

**Dr. Suadi Zainal, M.Si**

**Dr. Nirzalin, M.Si**

**Fakhrurrazi, M.Si**

# MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BUR TELEGE DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT GAYO

Dr. Suadi Zainal, M.Si  
Dr. Nirzalin, M.Si  
Fakhrurrazi, M.Si

Layout:  
**@musthafanetwork**

*Diterbitkan Oleh:*

**Bandar Publishing**

Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi Aceh. Hp.  
08116880801 IG. bandar.publishing TW. @bandarbuku FB. Bandar  
Publishing - Anggota IKAPI

**Dicetak oleh:**

**Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh**

*(Isi diluar tanggung jawab percetakan)*

**Cetakan Pertama, Maret 2023**

**Ukuran : 15,5 x 23,5 cm | Halaman: xii + 101 hlm**

---

## HAK CIPTA DILINDUNGAN UNDANG-UNDANG

All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izin ini dari Penerbit.

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

---

# KATA PENGANTAR

---

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**S**yukur Alhamdulillah, atas ramat dan karunia Allah SWT Buku Monograf hasil penelitian Model Ekonomi Hijau Kawasan Hutan Lindung (Studi Tentang Modal Sosial Masyarakat Gayo dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Hutan Lindung Bur Telege Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh) telah selesai dilakukan. Harmonisasi hubungan antara masyarakat dan alam hutan lindung Bur Telege tidak hanya berhasil menjadikan hutan lindung kebanggaan masyarakat Gayo ini tetap lestari tetapi juga mampu menjadi bagian ekosistem utama yang melindungi dan menjaga kehidupan berkelanjutan masyarakat Gayo khususnya yang mendiami kawasan hutan Bur Telege. Hubungan harmonis dan keterjagaan kelestarian hutan lindung Bur Telege merupakan kombinasi dialektis antara kearifan lokal berupa kepercayaan kuat masyarakat sekitar terhadap “*Peu Tempat*” atau “*Empunie Tempat*” (Penjaga Tempat) yang melahirkan norma wajib menjaga dan pantang merusak hutan lindung Bur Telege. Dikuatkan lagi dengan pengetahuan dan kesadaran praktis masyarakat bahwa Bur Telege adalah sumber kehidupan mereka terutama masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang.

Namun berdasarkan studi yang dilakukan kearifan lokal kepercayaan terhadap “*Peu Tempat*” meskipun masih dominan menjadi pengetahuan

dan referensi kalangan tua, hal ini sudah mulai tidak banyak diketahui oleh kaum muda Gayo. Sementara optimalisasi kemanfaatan ekosistem Bur Telege melalui usaha yang mengarah ke industri pariwisata Bur Telege satu sisi memperlihatkan perkembangan yang signifikan dan menggembirakan, namun minimnya keterampilan pelayanan terhadap turis/pengunjung (*tourism hospitality*), *net working*, dan infrastruktur membuat laju progresivitas perkembangan pariwisata tidak optimal.

Pada konteks ini dibutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah setempat untuk merevitalisasi pengetahuan kearifan lokal *Peu Tempat* khususnya bagi kalangan muda dan langkah-langkah tata kelola pengembangan strategis terhadap pariwisata Bur Telege. Kebijakan ini urgent dilakukan untuk menjamin kelestarian hutan lindung Bur Telege dan sekaligus pendapatan ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan. Keberhasilan penyelesaian riset ini tentu tidak dapat dipisahkan dari bantuan, arahan, bimbingan serta dorongan pelbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tim penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya atas kontribusi konstruktif untuk karya ilmiah ini. Harapan tim peneliti, buku ini dapat menjadi referensi tambahan pengetahuan tentang pelestarian hutan lindung, khususnya berkaitan dengan Hutan Lindung Bur Telege dan optimalisasi pengembangannya sebagai pariwisata berbasis lingkungan (*Ecotourism*) yang berkelanjutan.

Lhokseumawe, November 2022

*Tim Peneliti*

Ketua,

**Dr. Suadi Zainal, M.Si**

---

# PENGANTAR EDITOR

---

**P**engembangan pariwisata zaman sekarang mengalami puncaknya dan menjadi kekuatan ekonomi suatu negara. Negara yang maju dan berkembang berhasil menggali potensi wisata misalnya berdasarkan *World Travel and Tourism Council* seperti Islandia, Jepang, Qatar dan lain sebagainya (Apriyono 2016). Setelah dua tahun sektor pariwisata mati suri akibat Pandemi Covid 19, pada Mei 2022 mengutip dari laporan *Tourisme Development Index* Indonesia menempati peringkat 32 dari total 117 negara seluruh dunia. Posisi ini naik 12 peringkat apabila dibandingkan tahun 2019. Di kawasan Asia Pasific, sektor pariwisata Tanah Air berhasil menempati posisi ke 8 dari sepuluh besar. Di mana Jepang menduduki peringkat pertama, Australia dan Singapore (Fauzan 2022). Inilah potret wajah negara di dunia yang menjadikan pengembangan pariwisata sebagai kekuatan mengembangkan potensi yang berdampak pada kemakmuran rakyatnya.

Namun di balik semua itu, membicarakan pariwisata bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi semata. Ia sebagai sektor yang berkaitan dengan multisektoral, pariwisata tidak berada pada ruang yang hampa, melainkan ia ada dalam suatu sistem yang besar, komponennya saling terkait antara satu dengan yang lain dengan berbagai aspeknya. Mulai

dari aspek budaya, sosial, politik, keamanan, keagamaan, lingkungan dan sebagainya (Pitana and Gayantri 2005). Pariwisata sebagai objek studi dan ia merupakan suatu aktivitas yang memiliki pengaruh yang besar dengan masyarakat, oleh sebab itu telah banyak menarik minat akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkajinya. Jovicic (1977) dalam Richardson dan Fluker (2004) dalam Pitana dan Gayantri (2005) bahkan mengusulkan agar kajian tentang pariwisata di kembangkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang di sebut dengan nama *Tourismology*.

Selama ini wisata budaya merupakan salah satu andalan yang paling gampang untuk di komersialisasikan, hal ini memiliki alasannya yang kuat; pertama di setiap daerah masyarakatnya akan hidup dengan budaya masing-masing, dan itu satu dengan yang lain tidak sama. Ada kecenderungan budaya yang satu menjadi daya tarik bagi kelompok lainnya. Kedua wisata budaya menjadikannya sebagai bahan edukasi bagi yang meminatinya. Namun berbagai bentuk pola wisata tentu memiliki keunggulannya masing-masing sesuai dengan tipologi daerahnya, di kawasan keramaian perkotaan iapun menawarkan wisata ragam bentuknya, demikian pula di kawasan pedesaan menyuguhkan keindahan alam dan ketenangannya. Seiring waktu berjalan, wisatapun mulai menyasar kawasan hutan belantara sebagai daya tarik untuk di nikmati. Organisasi *The Ecotourisme Society* (1990) mendefinisikan ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat (Barat 2015). Walaupun masih tergolong kelompok wisata baru, namun antusias masyarakat kepada ekowisata sangat tinggi saat ini. Awal mula ekowisata hanya di lakukan

oleh mereka dari kalangan pecinta alam yang ingin menikmati lokasi wisata yang perawan dan lestari. Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk dari ekowisata ini berkembang karena banyak di gemari oleh wisatawan dengan berbagai alasan.

Di Indonesia sendiri ada beberapa tempat ekowisata paling terkenal dan berhasil mencuri perhatian hingga wisatawan mancanegara, di antaranya ada Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah, Tangkahan Sumatra Utara yang menawarkan pemandangan hutan yang masih alami, Raja Ampat Papua Barat, Taman Nasional Gunung Leuser Aceh. Ekowisatapun sebagaimana jika dikaji secara sosiologis, akan kita temukan hal-hal yang lain di balik apa yang tampak di depan mata. Seperti dalam hasil penelitian ini, kita menemukan bahwa dalam pengembangan Pariwisata Bur Telege di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, pengembangan ekowisata berjalan beriringan dengan kearifan lokal dan modal sosial. Bur Telege sendiri adalah kawasan gunung yang masih terjaga keperawanannya yang berdampingan dengan pusat Kota Takengon. Hubungan harmonis dan keterjagaan kelestarian hutan lindung Bur Telege merupakan kombinasi dialektis antara kearifan lokal berupa kepercayaan kuat masyarakat (“penjaga tempat”) yang kemudian menciptakan norma wajib menjaga dan pantang merusak hutan lindung Bur Telege. Modal sosial dalam pengembangan wisata hutan lindung Bur Telege sangat terlihat ketika peran agen (tokoh adat) dalam memobilisasi nilai-nilai kearifan lokal, mendorong masyarakat menjaga hutan dan mengembangkan Parawisata.

Penelitian ini mengantarkan kita kepada pemahaman pengembangan pariwisata hutan lindung Bur Telege adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat,



sehingga melahirkan berbagai dampak masyarakat setempat. Tidak berlebihan jika pada akhirnya pengembangan wisata ini memperlihatkan energi dobrak yang luar biasa, dan mampu membuat perubahan masyarakat dan bertanggungjawab tidak hanya kepada lingkungan, namun juga kepada sang pencipta. Masyarakat Gayo di Kampung Hakim Bale Bujang kecamatan Laut Tawar dalam hal ini telah menunjukkan bahwa bersahabat dengan alam, dan alampun akan memberikan serta menjaga manusia yang menempatinnya.

Banda Aceh, Januari 2023

**Nofal Liata, M.Si**

---

# Referensi

---

- Apriyono, Ahmad. 2016. "8 Negara Yang Maju Dan Berkembang Dari Sektor Pariwisata." *Www.Liputan6.Com*, 2016.
- Barat, Dina Parawisata Provinsi Nusa Tenggara. 2015. "Ekowisata." *Www.Disbudpar.Ntbprov.Go.Id*, 2015.
- Fauzan, Rahmad. 2022. "Ranking Indeks Pariwisata Indonesia Naik, Nomor 8 Di Asia Pasifik." *Ekonomi.Bisnis.Com*, 2022.
- Pitana, I Gde, and Putu G. Gayantri. 2005. *Sosiologi Parawisata*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.



---

# DAFTAR ISI

---

<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>Pengantar Editor</b>	<b>v</b>
<b>Referensi</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Permasalahan	1
1.2 Tujuan Penulisan	6
<b>BAB II EKONOMI HIJAU, HUTAN LINDUNG DAN EKOWISATA</b>	<b>7</b>
2.1 Ekonomi Hijau	7
2.2 Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan	9
2.3 Wisata Alam (Ekowisata) dan Parawisata	20
2.4 Kawasan Hutan Lindung dan Perkembangan Ekowisata	22
2.5 Ekonomi Hijau dalam Pengembangan Ekowisata	25
2.6 Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan	27
2.7 Pemanfaatan Kearifan Lokal dan Modal Sosial dan Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan	31

<b>BAB 3 METODE DAN PROSES ANALISIS DATA</b>	<b>33</b>
3.1 Lokasi Penelitian	<b>33</b>
3.2 Informan Penelitian	<b>35</b>
3.3 Teknik Pengumpulan Data	<b>35</b>
3.4 Teknik Analisis Data	<b>39</b>
<b>BAB 4 MASYARAKAT HAKIM BALE BUJANG DAN EKOWISATA BUR TELEGE</b>	<b>41</b>
4.1 Profil Masyarakat Desa Hakim Bale BuJang	<b>41</b>
4.2 Hutan Lindung Bur Telege dan Masyarakat Hakim Bale Bujang	<b>55</b>
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>87</b>

# BAB I

---

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Permasalahan

Paradigma developmentalisme yang menjadi *mainstream* utama pembangunan dunia dalam beberapa dekade telah mendorong terjerembabnya dunia dalam degradasi lingkungan yang akut sehingga mengancam kehidupan manusia sebagai satu ekosistem. Kenyataan ini mendorong para ahli pembangunan dan pemimpin dunia memunculkan paradigma ekonomi hijau (*green economy*) sebagai ideologi pembangunan ekonomi dunia yang baru (Loiseau et al., 2016). Beralaskan paradigma baru ini, tata kelola pembangunan dunia dirancang sebagai pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip membangun tidak hanya untuk optimalisasi keterpenuhan kebutuhan generasi saat ini

tetapi juga menyiapkan dan menjamin sumberdaya alam tersedia bagi keterpenuhan kepentingan dan kebutuhan generasi yang mendatang.

Filosofi ini menyamai keseluruhan pembangunan dunia yang direpresentasikan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) terhadap semua kebijakan terkait dukungan terhadap pembangunan dunia. Adopsi PBB ini bukan sebagai kebijakan sepihak yang sunyi dari dukungan anggotanya. Realitansya, bahkan 195 negara di dunia menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDG) sebagai jargon utama yang menjadi ikon pencapaian pembangunan dunia termasuk dalam tata kelola hutan bagi kepentingan pembangunan ekonomi yang hendak diwujudkan pada 2030 (Dona Octavia, Irma Yeny, 2020).

Pada konteks kehutanan Pengelolaan hutan atau sumberdaya alam lainnya diarahkan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Arianto, 2019). Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan paradigma ekonomi hijau sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Indonesia, 2022). Melalui paradigma ini yang diikuti oleh implementasi yang konsisten secara berjenjang ditingkat pemerintah dan semua pihak yang terlibat, maka kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Marjinalisasi masyarakat lokal yang sering menjadi isu klasik pada setiap proses pelaksanaan pembangunan nasional disuatu negara dapat direduksi. Bahkan masyarakat lokal justeru menjadi pelaku utama yang terlibat dan merasakan kemanfaatan optimal (Ivlev & Ivleva, 2018).

Salah satu pengelolaan sumberdaya alam hutan yang berhasil menciptakan ekonomi berkelanjutan adalah pengelolaan hutan lindung Bur Telege di Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh. Keberhasilan ini

tidak berdiri sendiri, suatu energi kolektif yang mendorong masyarakat Gayo mengelola dan menjaga hutan secara bijaksana menjadi kuncinya. Pada tataran empiris, kearifan lokal konstruktif memberikan kontribusi positif terhadap kelestarian alam dan keseimbangan antara alam dan masyarakat. Pada aspek itu, internalisasi nilai-nilai ekologis yang terdapat di dalam kearifan lokal masyarakat mendesak dilakukan dan ditransformasikan (Muhammad, 2017; Niman, 2019). Tanpa kearifan lokal yang menjadi tuntunan nilai dalam bertindak, maka hutan akan diposisikan sebagai komoditi *an sich*, akibatnya hutan akan dieksploitasi tanpa motivasi moral untuk menjaganya. Gundulisasi hutan-hutan lindung maupun produktif yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara lainnya merupakan eksplisitasi dari posisi objektivasi hutan sebagai komoditi ekonomi.

Berbeda dengan masyarakat Gayo, beberapa negara seperti di Amerika Latin dan Indonesia lainnya, hutan lindung dieksploitasi untuk pembukaan lahan pertanian baru (Faisal, 2019), dan pembalakan liar (Torres-Rojo, 2021) termasuk di wilayah Aceh umumnya yang memiliki lembaga adat khusus “Pawang Uteun” tidak terlepas dari perilaku eksploitatif masyarakat terhadap hutan untuk pertanian dan pemukiman yang mengancam habitat lainnya (Fadhli et al., 2021; Muna et al., 2021) yang pada gilirannya juga mengancam manusia.

Namun, masyarakat Gayo yang mendiami kawasan hutan lindung Bur Telege justeru mampu melestarikannya tanpa mengurangi pemanfaatannya untuk peningkatan ekonomi mereka. Bahkan sejak 2017, secara kolektif masyarakat menjadikan kawasan hutan Lindung Bur Telege sebagai lokasi pariwisata. Pariwisata yang berbasis pada lingkungan ini (*ecotourism*), kini telah menarik perhatian para



pengunjung dari pelbagai wilayah baik Aceh maupun Sumatera Utara. Perkembangan pariwisata yang pesat didorong oleh tingginya animo para wisatawan untuk menikmati keindahan panorama dan kesejukan udara di Bur Telege. Sesuatu yang sudah sulit ditemukan di wilayah kota Indonesia lainnya.

Kini hutan lindung Bur Telege tidak hanya menjadi penyedia air bersih bagi kehidupan keluarga, sumber jaminan air bagi Danau Lut Tawar dan lahan pertanian warga, tapi juga sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Hakim Bale Bujang. Perilaku kolektif tidak lahir begitu saja, melainkan didorong oleh norma yang menjadi pengetahuan umum masyarakat. Kewajiban moral dan sosial yang mengikat solidaritas dan kolektifitas tidak lain diikat oleh kearifan lokal yang hidup, tumbuh, berkembang dan menjadi rujukan tindakan masyarakat (Wulandari, 2019). Kearifan lokal ekologis yang melahirkan norma, rasa saling percaya dan hubungan kerjasama dalam bekerja bertransformasi menjadi modal sosial masyarakat (Rahmaniyah & Rokhani, 2021).

Hidupnya kearifan lokal untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan tentu sangat dipengaruhi oleh peran para agen, seperti tokoh adat dalam memobilisasi nilai-nilai kearifan lokal. Dalam teori strukturasi Giddens, realitas seperti ini diformulasikan dalam tiga aspek, yaitu struktur, sistem, dan strukturasi (Nashir, 2012). Artinya mobilisasi nilai-nilai kearifan lokal yang menjelma menjadi aturan hidup/dipraktikkan oleh masyarakat terlihat dalam tiga hal tersebut yang saling terkait secara sistemik.

Elite sosial dalam komunitas memegang kunci dalam transformasi dan mobilisasi tindakan kolektif pada tujuan bersama yang

merefleksikan kepentingan yang sama pula antara mereka dengan anggota masyarakat secara keseluruhan. Internalisasi nilai-nilai yang dipercaya sebagai kebajikan kolektif oleh masyarakat tentunya tidak terjadi hanya dengan penyampaian-penyampaian dalam bentuk verbal tetapi juga meniscayakan adanya contoh teladan pada tindakan praktis yang dilakukan oleh aktor berpengaruh dimasyarakat yaitu tokoh-tokoh kharismatik yang terdiri dari orang-orang yang di tuakan. Pada masyarakat Gayo di Kampung Hakim Bale Bujang, mereka terdiri dari Reje (Kepala Desa) aparatur pemerintahan kampung, tetua dan pinisepuh yang dihormati dan muliakan.

Realitas saat ini menarik untuk dikaji, utamanya bisa menemukan model ekonomi terkait hutan lindung di Bur Telege yang di kembangkan pada masyarakat Gayo di Kampung Hakim Bale Bujang. Temuan studi ini menjadi pembelajaran berharga (*Lesson Learned*) bagi masyarakat Indonesia lainnya yang mendiami kawasan ekologi hutan lindung.

Kajian dalam buku yang sedang pembaca nikmati ini difokuskan pada pengeksploasian kearifan lokal dan modal sosial yang mendorong ekowisata berkelanjutan, yaitu:

1. Nilai-Nilai Kearifan Lokal seperti apa yang mendorong masyarakat Bale Bujang menjaga kelestarian Hutan Lindung Bur Telege lintas generasi?
2. Bagaimana praktik Ekonomi Hijau Pariwisata Bur Telege yang dikembangkan oleh masyarakat Bale Bujang?
3. Modal Sosial seperti apa yang mengintegrasikan dan mendorong masyarakat Bale Bujang dalam mengembangkan Pariwisata Bur Telege?

## 1.2. Tujuan Penulisan

Sangat besar kemungkinan, mengenai isi dari buku ini di perlukan oleh peminat terkait tema yang sama yang di lakukan oleh peneliti sosial berikutnya, khususnya semangat dari peneliti muda dalam kepakaran ilmu sosial, sosial lingkungan, sosial ekonomi, oleh sebabnya maka di butuhkan yaitu:

1. Dibekali pemahaman dan pencerahan untuk para calon peneliti muda dan juga kepada stakeholder terkait model ekonomi hijau wisata
2. Memberikan kepastian utamanya menemukan model mobilisasi kearifan lokal masyarakat Gayo di sekitar hutan lindung Bur Telege Kampung Hakim Bale Bujang yang menjamin keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi.
3. Temuan studi ini dapat menjadi *Lesson Learned* bagi masyarakat lainnya yang memanfaatkan hutan lindung sebagai sumber ekonomi.

# BAB II

---

## EKONOMI HIJAU, HUTAN LINDUNG DAN EKOWISATA

---

### 2.1. Ekonomi Hijau

Konsep ekonomi hijau atau *green economy* yaitu suatu konsep yang relatif sedang baru, dilain sisi konsep ini sejatinya kelanjutan dari apa yang di maksud dengan *sustainable development* (Wiratma & Nurgiyanti, 2019). Berdasarkan dari Wiyekti (2021) ekonomi hijau yaitu masanya rezim ekonomi yang bertujuan menaikan kesetaraan sosial dan kesejahteraan sosial, walaupun demikian memberikan resiko terhadap lingkungan alam secara signifikan. Ekonomi hijau sama halnya dengan perekonomian tergolong rendah, dan juga ia akan menghasilkan yaitu emisi karbon dioksida, berkeadilan sosial dan hemat sumber daya alam. Ekonomi hijau ekologis bisa dikatakan sebagai sebuah model menumbuhkan

ekonomi berlandas pembangunan serta bernilai pengetahuan ekonomi ekologis. Paling mudah melihat ciri dari ekonomi hijau yang membedakan dari model ekonomi lainya adalah pada penilaian terhadap modal alami serta jasa ekologis yang dimanfaatkan sebagai nilai ekonomi, akuntansi pembiayaan diwujudkan kepada masyarakat dan dapat ditelusuri ulang dan dihitung sebagai kewajiban, tidak mengabaikan dan membahayakan aset.

Pada saat ekonomi hijau telah menjadi fokus, disebabkan adanya permasalahan lingkungan akibat dari keadaan penduduk melanda miskin, peran lemah dari warga setempat serta komitmen dari pihak institusi ketika mewujudkan pertumbuhan pembangunan berkelanjutannya. Maka ketika itulah harus ada kesadaran bersama-sama dalam melaksanakan ekonomi hijau untuk kesejahteraan yang adil, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ilmi (2021) berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa, sumber daya alam yang dieksploitasi namun tak dapat diperbarukan, menyebabkan sumber daya tersebut semakin buruk. Akibat perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi ini diperparah lagi, perubahan iklim dan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berkurangnya sustainabilitas ekonomi akibat ulah tangan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan.

Menurut Putri et al., (2021), kondisi ekonomi hijau dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti aktivitas ekonomi dan kualitas udara. Dimasa pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi tidak lepas dari kasus positif Covid-19 dan mobilitas penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi hijau Indonesia di era pandemi, seperti aktivitas ekonomi, kualitas udara, tingkat

mobilitas penduduk, dan kasus positif Covid-19 dapat memiliki hubungan kausalitas satu sama lain.

Berdasarkan data Kemenkeu (2021) pada saat ini perubahan iklim merupakan tantangan paling besar bagi umat manusia. Dan pemerintah berharap mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan ekonomi hijau dan green budgeting. Dalam hal ini diperlukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan bersama dengan komitmen kuat dalam upaya menyelamatkan masa depan peradaban. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan merupakan faktor sosial ekonomi yang semestinya keberadaan sosial mereka dalam marginal menuju proses transaksi ekonomi yang eksploitatif dan ketimpangan. Sehingga dari pihak yaitu produsen, masyarakat tidak menerima bagian penghasilan yang besar. Di lain sisi kelompok yang mendapatkan keuntungan yaitu mereka dari pihak pemilik modal. Adapun kesemerautan dan kacau-balau di kehidupan masyarakat akan tergambar dari latar belakang tingkat pendidikan rendah, tabiat jelek membuang sisa makan dari konsumsi rumahan di dalam perkarangan rumah, yang itu akan berakibat pada limbah semakin menumpuk, akhirnya kualitas lingkungan menjadi jorok dan kotor, air bersih jadi terbatas untuk di dapatkan, kesadaran kesehatan tidak mendapat perhatian, dan kemampuan ekonomi mencari nafkah tidak menentu.

## **2.2. Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan**

Selama ini dari berbagai belahan negara di permukaan bumi ini, dihadapkan ke persolan krusial degradasi sumber alam, lingkungan, sumber daya pangan dan sumber daya energi yang tidak pasti. Bersamaan eksploitasi sumber daya alam kian menunjukkan buruk sumber daya lingkungan, akibat dari tindakan manusia yang tidak ramah

terhadap lingkungan. Di antara indikasi resiko adalah ancaman dari perubahan iklim serta pemanasan global menunjukkan akan mengurangi keberlanjutan bumi untuk memenuhi akan kebutuhan dan kesejahteraan nasib manusia di atasnya.

Perbincangan serius tentang pembangunanisme yang melahirkan kerusakan lingkungan sudah dimulai pada tahun 1950-an, diskusi ini hangat tidak hanya dari kalangan ilmuwan, tetapi juga politisi maupun masyarakat umum. Fokus perbincangan tidak hanya diarahkan pada terjadinya pelbagai kasus pencemaran terhadap lingkungan hidup, tetapi juga jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit dari manusia. Bahkan terus menerus mengancam kematian jika tidak mampu dilakukan perubahan kebijakan paradigmatis yang fundamental. Ada sejumlah kasus terkait lingkungan hidup yang berakibat jatuhnya korban manusia, misalnya pada akhir tahun 1950, insiden pencemaran sungai Jintsu di Jepang yang berakibat timbulnya penyakit sangat ditakuti yang kemudian disebut dengan nama penyakit minamata (itai-itai). Penyakit ini muncul di sungai Jintsu sudah tercemari oleh kadmium (Cd) adalah limbah dari sebuah pertambangan Seng (Zn) (Istarani & Pandebesie, 2014).

Berdasarkan dari upaya penelitian terhadap kasus ini menunjukkan yaitu, kadar Cd berada dalam beras di wilayah tersebut yang memperoleh sumber air dari sungai dan mengandung kadmium 10 kali lipat lebih tinggi dari daerah lain. Tahun 1953 penduduknya yang memiliki tempat tinggal di situ Teluk Minamata, negara Jepang terdapat wabah dari penyakit neurologik berujung pada kematian sejumlah penduduknya. Akhirnya ketika ada upaya penelitian menunjukkan bahwa penyakit tersebut memang berasal dari air raksa (Hg) yang diproduksi dari limbah industri pabrik kimia setempat.

Ironisnya untuk air yang dikonsumsi tersebut oleh penduduknya mengalami naiknya kadar ambang batas mejadikan keracunan serta berakibat jatuhnya korban jiwa. Kasus terkontaminasi ini telah mengakibatkan keracunan yang kemudian disebut sebagai penyakit Minamata. Disamping kasus pencemaran lingkungan diatas, isu pemanasan global juga sangat menonjol muncul dalam topik-topik diskusi. Realitasnya, pemanasan global yang dirasakan dan sedang terjadi saat ini dikarenakan oleh ulah manusia sendiri. Hal tersebut telah terbukti selama 50 tahun terakhir ini, penyebabnya adalah dari emisi gas-gas rumah kaca, misalkan  $N_2O$  dan  $CO_2$  sumbernya merupakan ulah manusianya sendiri. Terkait kosentrasi dari gas  $CO_2$  telah mengalami naik hingga 30% ke atmosfer sampai 150 tahun terakhir. Persolan utama menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah emisi  $CO_2$  ini yaitu akibat dari pembakaran sumber energi adanya penggunaan bahan fosil (contoh sederhana adalah minyak bumi) (Mulyani, 2021).

Pemanfaatan sumber daya alam dari lainnya juga mengalami perubahan, misalkan adanya pengundulan hutan diikuti oleh hutan yang dibakar, lahan beralih fungsinya (hutang lindung dipaksakan jadi musnah dan hutan produksi banyak muncul) dapat memberikan kontribusi kenaikan jumlah  $CO_2$  di atmosfer sebanyak 15% (Magazine, 2006; UBA, 2002; WRI, 2000). Adapun degradasi tanah atau hilangnya kesuburan tanah merupakan masalah ekologi lainnya. Hal ini dampak dari erosi air dan juga angin, pengasaman tanah, penggaraman dan lain sebagainya. Menghilangnya kesuburan tanah juga akibat dari menghilan pelapisan humus serta mikro organisme, yaitu kebutuhan zat makan untuk tanah, dan kemampuan tanah dalam mengurai limbah-sampah. Tanah yang tergolong tandus (tidak ada sumber air, kering) adalah akibat



dari degradasi sumber daya kondisi tanah. Hal ini juga pernah di alami di Indonesia, misalkan di daerah Jawa khususnya Gunung Kidul Yogyakarta.

Kondisi dunia akhir-akhir ini, terdapat 15% permukaan lahan sudah mengalami degradasi. Penyebab utama dari terjadinya erosi baik akibat dari angin dan air, degradasi lahan tanah ini adalah akibat dari pemanfaatan kandungan kimia (paling mudah untuk di kenal banyak orang seperti penggunaan pestisida) (WRI, 2000). Di depan mata yaitu ancaman keberlangsungan ekosistem, keanekaragaman hayati sudah menjadi persoalan ekologi. Di setiap tahun terdapat sekitar 6000 hewan mengalami punah, terdiri dari 34% ikan, 25% mamalia dan 13% unggas (Diplomatique, 2003; WRI, 2000). Terancamnya keanekaragaman biologis bukanlah semata berarti sumber daya alam juga dapat di dimanfaatkan untuk obat-obatan dan tempat rekreasi, akan tetapi juga terancam keberlangsungannya ekosistem dari keseluruhan, terancamnya kemampuan alam sebagai penyedia sumber daya guna untuk produksi (fungsi ekonomis). Dalam hal ini fungsi dari regulasi perlu diperbaiki (baca “interaksi antara ekonomi dan ekologi”).

Penggunaan air di setiap tahun, terlihat meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah manusia di muka bumi, seperti sudah menjadi hukum alam. Tidak hanya itu pertumbuhan dunia industri juga termasuk di dalamnya dan usaha pertanian, yang membutuhkan air yang tidak sedikit. Keseluruhan dari total pengkonsumsian air di dunia oleh manusia, ada 70% yang akan di gunakan untuk mencukupkan kebutuhan di sektor pertanian. Terkait air telah terkontaminasi dan lahan yang semakin diperburuk ketahan air bersih guna mencukupkan hidup manusia. Tercemarnya air dan tanah lahan garapan, penyebab utamanya

dari kondisi ini adalah manusia menggunakan pupuk serta pestisida khususnya dilakukan kelompok tani dan area perkebunan (WRI, 2000).

Selama kurun waktu terakhir seratus tahun, perkembangan jumlah penduduk meningkat sangat cepat terutama di negara yang sedang berkembang (UNDP, 2002). Perkiraan populasi jumlah penduduk di dunia mengalami naik hingga 7,8 milyar orang di tahun 2025, dimana 6,7 milyar umat manusia yang hidup di negara sedang berkembang . pertumbuhan jumlah popolasi penduduk ini di akibatkan beberapa faktor, misalkan terdapat rendahnya akan pendidikan, belum memadai jaminan sosial di negara yang melanda, agama/kepercayaan dan budaya, diskriminasi ke kaum wanbita dan urbanisasi (Commission, 2002).

Beberapa penyebab di atas menghasilkan tingkat populasi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan, persoalan kemiskinan serta kekurangan air berujung pada ke masalah minimnya gizi untuk manusia. Diantara tahun 1978-2000, hasil perkiraan FAO ada 840 juta penduduk yang akan mengalami kurangnya gizi kronis, 800 juta penduduk menlangsungkan hidup pada negara yang sedang berkembang (FAO, 2022). Ada enam juta usia anak-anak yang di bawah 5 tahun hilang nyawanya karena kekurangan gizi di setiap tahunnya. Kaitan kesehatan masyarakat yang menggantung hidup di negara sedang berkembang juga diperburuk oleh adanya perang serta air yang tercemar. Di masa kini ada lebih dari setengah milyar penduduk hidup tidak ada akses ke air bersih, serta 2,5 milyar penduduk itu tidak ada prasarana sanitasi (kebersihan) layak (UNDP, 2002). Buntut dari persoalan ini adalah hadirnya penyakit dan juga kematian diperkirakan mencapai 5 juta manusia pada setiap tahunnya.

Persoalan kesenjangan antara negara kaya dengan nagara miskin semakin terlihat tegas sejak tahun 90-an (UNDP, 2002). Misalnya, pada tahun 1999, di suatu negara miskin, terdapat 2,8 milyar penduduk hanya memperoleh 2 US Dollar/hari untuk menyambung hidupnya. Kesenjangan seperti ini tidak hanya berlangsung antara negara miskin/berkembang dengan kaya, tetapi juga terjadi di dalam suatu negara sendiri. Pada sudut lain, perubahan keadaan sikitar lingkungan hidup (ekologi), globalisasi ekonomi, perubahan budaya serta konflik Selatan-Utara menambah deretan persoalan kemanusiaan yang berimbas terhadap kompleksitas masalah sosial bagi penduduk dunia.

Sejak tahun 1990-an, dimana globalisasi muncul tanpa terbandung dan setiap negara mau tidak mau harus menghadapinya. Dengan adanya globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi, komunikasi dan telekomunikasi serta transportasi maka semakin mempermudah hubungan ekonomi antar negara dan wilayah/regional. Ditambah lagi dengan adanya perdagangan bebas yang mendapat dukungan dari pemerintah melalui kemudahan bea cukai (Commission, 2002). Untuk itu, supaya tidak terlindas oleh negara yang lebih maju dan kaya, diperlukan persiapan diri yang tangguh bagi semua negara dalam menghadapi globalisasi.

Berbagai masalah di atas mendorong lahirnya gagasan pembentukan WCED (*World Commission on Environment and Development*) oleh PBB tahun 1983. Komisi ini mempunyai andil yang sangat besar dalam merumuskan wawasan lingkungan dalam pembangunan di semua sektor. Pendekatan yang dilakukan WCED terhadap lingkungan dan pembangunan terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu: keterkaitan,

berkelanjutan, pemerataan, keamanan dan risiko lingkungan, pendidikan dan komunikasi, serta kerjasama Internasional.

WCED (1987), menasbihkan frase "Masa depan umat manusia terletak pada terealisasinya paradigma *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai paradigma pembangunan manusia". Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dimaknai dan didefinisikan sebagai "Pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat generasi saat ini dengan tidak menghambat kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya" (Soemarwoto, 2016). Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh WCED diatas, Grundy (1993) menegaskan pembangunan berkelanjutan memiliki tiga kompoenen yang terintegrasi. Ketiga komponen tersebut adalah: (1) Ekologi berkelanjutan, (2) sosial berkelanjutan, dan (3) ekonomi berkelanjutan.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keterlibatan pelbagai pihak, tidak terkecuali Lembaga Swadaya Masyarakat baik nasional maupun internasional. Pada tataran internasional Lembaga-Lembaga Swadaya masyarakat yang memberi kontribusi nyata antara lain; European Communitis (EC), OECD, IUCN, atau Association of Southeast Asian Nations. Terdapat pula, beberapa LSM Internasional yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan di tingkat nasional di beberapa daerah, seperti WWF, TNC Indonesia Program, WEC, OISCA, AWB, CUSO, FWZS, ICBP, Sticthing FACE, Conservation International, maupun Care International Indonesia. Kesemua Lembaga Swadaya masyarakat ini memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat guna berpartisipasi aktif pada pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Pelbagai persoalan yang muncul kepermukaan pada aspek lingkungan dan sosial, terkait erat dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi baik bentuk produksi barang dan jasa. Petaka kerusakan lingkungan direproduksi oleh paradigma pembangunan developmentalisme yang disokong oleh filosofi kapitalisme-liberalisme, yang mengakibatkan manusia bertindak antroposentrime dalam memperlakukan alam. Paradigma ini, dalam praksisnya telah menempatkan alam dan manusia sebagai analog komoditas ekonomi, sehingga menciptakan relasi eksploitatif terhadap alam dan masyarakat lokal. Kenyataan ini berujung pada destruksi ekologi manusia dan alam. Perubahan iklim, pemanasan global dan peminggiran masyarakat dari pusat dan tujuan pembangunan itu sendiri adalah dosa-dosa turunan yang terus tercatat secara statistik. “Dosa” paradigmatis ini tidak terampuni, sehingga mendesak masyarakat internasional mendengungkan perubahan radikal terhadap paradigma pembangunan global. Sejak hampir empat dekade yang lalu masyarakat global melalui agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyuarakan paradigma pembangunan dunia baru yang diberi label sebagai pembangunan berkelanjutan (Sutopo et al., 2014).

Nilai-nilai inti dari pembangunan berkelanjutan adalah hubungan triadik antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian alam. Namun, filosofi pembangunan berkelanjutan ini masih sekedar menjadi jargon tanpa memiliki relevansi empiris. Nyatanya, pembangunan yang diimplementasikan di hampir seluruh dunia belum menempatkan isu ekologi manusia dan alam sebagai basis rencana, apalagi kebijakan dan programnya. Alhasil, interaksi antara manusia dengan alam semakin jauh dari prinsip-prinsip keberlanjutan, yang pada

akhirnya alam justru terus menerus mengancam kehidupan manusia. Pada ranah epistemologis, panggung realitas ini terkonstruksikan tidak lain karena dosa logika Cartesian yang menciptakan dualisme antara ilmu alam dan ilmu sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan pandangan integratif ala Giddensian dan Kantinian untuk melahirkan kontribusi solutif terhadap kehidupan masyarakat melalui implementasi pembangunan yang pro ekologi manusia dan alam khususnya keilmuan sosial dan humaniora. Menyadari hal tersebut pada abad ke-21 mulai dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini (Makmun, 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat membutuhkan konsep pembangunan berkelanjutan dan mesti dilaksanakan di seluruh wilayah daerah. Berdasarkan data Keuangan (2021), Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki iklim tropis terbesar di dunia. Sebuah negara yang sangat mudah terdampak perubahan iklim seperti gempa, tsunami, banjir, kekeringan, penurunan kualitas air bersih, dan peningkatan prevalensi penyakit dapat semakin menghampiri apabila persoalan perubahan iklim tidak ditangani dengan cepat. Akan tetapi, persoalan tersebut bukan hanya menjadi ancaman bagi Indonesia saja. Perubahan iklim merupakan ancaman bagi seluruh kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi, tanpa terkecuali. Kenyataannya, mengatasi perubahan iklim lebih sulit dibanding menangani pandemi.

Oleh sebab itu, jalan solutif adalah menerapkan konsep SD untuk pengembangan ekonomi di wilayah daratan pegunungan, yang dikenal dengan Ekonomi Hijau (*Green Economy*). Menurut Lavrinenko et al., (2019) ekonomi hijau adalah sistem ekonomi di mana aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa dititikberatkan pada peningkatan

kesejahteraan holistik dan adil dalam jangka panjang tanpa menempatkan generasi mendatang pada risiko atau defisit lingkungan. Senada ini, Organisasi Perlindungan Lingkungan PBB menyatakan ekonomi hijau adalah ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial serta signifikan mengurangi risiko akibat degradasi lingkungan. Secara operasional, diantaranya dapat dilakukan melalui investasi teknologi rendah karbon, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan seperti perikanan dan hutan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan yang adil dengan mengurangi risiko terhadap sumber daya alam.

Prinsip dasarnya adalah keadilan dan objektivitas dalam satu generasi dan antar generasi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing dan pertumbuhan. Untuk mencapai ekonomi hijau, pemangku kepentingan harus memberikan perhatian khusus melalui kebijakannya. Beberapa negara telah mengembangkan ekonomi hijau berdasarkan prioritas nasionalnya. Indonesia, sejak tahun 2012 berkomitmen beralih dari *greed economy* (ekonomi serakah) kepada *green economy* (ekonomi hijau yang ramah lingkungan) dengan slogan “*Moving towards Sustainability: Together We Must Create the Future We Want*”.

Salah satu modal penting ekonomi hijau adalah modal sosial. Secara umum, modal sosial didefinisikan sebagai kombinasi struktur sosial, organisasi sosial, dan kumpulan hubungan yang dilembagakan, seperti kepercayaan, jaringan, dan norma. Menurut Santoso (2020) istilah modal sosial dikemukakan pertama kali oleh Hanifan tahun 1916 dalam bukunya “*The Rural School Community Centre*”. Namun mulai banyak dibicarakan ketika Bourdieu (2018) menuliskan “*The Forms*

*of Capital*”, yang menyimpulkan struktur dan fungsi sosial tidak dapat dipahami hanya lewat modal ekonomi, tetapi harus melibatkan modal sosial. Selanjutnya Coleman (2009) melalui tulisannya “*Social Capital in the Creation of Human Capital*”, menyimpulkan bahwa modal sosial bersifat produktif, berperan menciptakan modal manusia. Sementara itu, Fukuyama (1996) dalam bukunya “*Trust: The Social Virtues and The Creations of Prosperity*” menyatakan bahwa kesejahteraan, demokrasi dan daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antar warga yang mengakar pada budaya, etika dan moral. Modal sosial mulai lebih tenar melalui karya Putnam (2016) “*Bowling Alone: America’s Declining Social Capital*”, yang menjelaskan hubungan kepercayaan, jaringan dan norma resiprositas dengan partisipasi politik masyarakat.

Jundiani & Prajamufti (2011) memberi pandangan bahwa Indonesia sudah mengupayakan pelaksanaan gagasan pembangunan berkelanjutan dalam program serta strategi pengelolaan lingkungan. Sebagaimana tertulis di dalam dokumen agenda 21 negara Indonesia. Perumusan strateginya dikelompokkan dalam empat kategori bidang, yaitu: (1) Pelayanan masyarakat, bidang agenda ini mengandung bahwa fokus pembangunan serta pengelolaan lingkungan hidup juga harus diarahkan ke dimensi lain; (2) Pengelolaan limbah, dirumuskan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan; (3) pengelolaan sumber daya tanah; dan (4) pengelolaan sumber daya alam. Walaupun demikian, hingga saat ini praktik pembangunannya masih lebih fokus pada pembangunan ekonomi. Model pembangunan ekonomi terlihat hanya menggerakkan ekonomi yang cenderung ekstraktif dan berjangka pendek. Oleh karena itu, dapat dikatakan upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.



Realitas di atas telah mendorong para aktor elit pembangunan Indonesia mengembangkan pendekatan ekonomi hijau yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Data (Keuangan, 2021) menyatakan bahwa dibutuhkan dana besar dalam aksi perubahan iklim, sehingga dalam hal ini sangat penting peran dari para Menteri Keuangan. Supaya pengendalian perubahan iklim mampu berjalan dengan lancar maka diperlukan kerja sama internasional dan komitmen yang kuat dari berbagai negara. Selanjutnya, semua negara wajib berkontribusi dalam upaya mengurangi emisi, yang mana hal tersebut tercantum dalam *Paris Agreement* tahun 2016.

### **2.3. Wisata Alam (Ekowisata) dan Pariwisata**

Beberapa studi terbaru tentang ekowisata ditingkat internasional antara lain dilakukan oleh (Jones, 2005), di Gambia yang menemukan modal sosial berperan dalam pembentukan *ecocamp* jika modal sosial kognitif dan struktural berjalan paralel. Sementara, studi Marcinek & Hunt (2015), mengidentifikasi modal sosial yang hilang dalam pembangunan dapat ditumbuhkan kembali melalui ekowisata. Selanjutnya, studi García-Amado et al., (2011) di Mexico menemukan modal sosial dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menguatkan peraturan kelembagaan, dan kajian Ramón-Hidalgo & Harris, (2018) di Ghana mengungkapkan penduduk dengan akses yang lebih besar ke modal sosial memiliki tingkat pemberdayaan yang lebih besar. Sementara penelitian Shie (2020) di Taiwan, menyimpulkan keberhasilan ekowisata tergantung pada modal sosial yang memobilisasi masyarakat beradaptasi dengan pengembangan pariwisata.

Sementara beberapa kajian ekowisata di Indonesia antara lain dilakukan oleh Situmorang, (2018), di Sei Nagalawan yang menemukan modal sosial berhasil merehabilitasi kawasan mangrove dan memanfaatkan sumber dayanya untuk kesejahteraan ekonomi berkelanjutan. Sementara kajian Wulandari (2019) di Lampung menunjukkan modal sosial pengurus Pinus Ecopark bertipe modal sosial mengikat dan menjembatani. Sedangkan, kajian Rahmaniya & Rokhani (2021) di Situbondo menemukantipe modal sosial yang dimiliki masyarakat, yaitu; *bonding*; *bridging*; dan *linking*.

Namun demikian, kajian (Hasanah et al., 2022) menyatakan hanya beberapa ekowisata dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat lokal secara total. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kontrol dalam ekowisata relatif rendah di negara-negara Asia dibandingkan dengan Amerika Selatan dan Afrika.

Secara teoritis, pariwisata kawasan hutan lindung perlu dikelola sesuai dengan cara pandang masyarakat untuk mengurangi risiko negatif terhadap lingkungan. Pengembangan ekowisata penting untuk menciptakan integrasi sosial, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi antara alam, masyarakat dan pariwisata merupakan kunci pengembangan pariwisata dikawasan hutan lindung sebagai ekonomi hijau. Istilah ekonomi hijau diperkenalkan oleh peneliti Inggris, Pearce D pada tahun 1989. Pearce menyimpulkan bahwa ekonomi hijau adalah jalan tengah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang sesuai kepentingan dalam melihat pembangunan.

Banyak penelitian yang menjelaskan hubungan positif antara modal sosial dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya pada ekonomi mikro,

kepercayaan dan kerjasama dalam perusahaan, industri atau pasar dapat menurunkan biaya transaksi, sementara dalam perspektif ekonomi makro, modal sosial dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi. Senada ini, Yunus et al., (2020) menemukan, petani yang memiliki modal sosial yang lebih tinggi memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah. Dalam konteks sosial lainnya, tingkat *bonding social*, *bridging social*, dan *trust* mempengaruhi keterikatan komunitas, dan interrelasi komunitas, negara dengan modal sosial dapat mengatasi krisis dengan efektif. Perkembangan modal sosial dipengaruhi oleh pendidikan, generasi, agama, pekerjaan, stabilitas residensi, kesehatan, dan kriminalitas.

Model ekonomi hijau memperkaitkan empat modal utama, yaitu: modal fisik, modal manusia, modal sosial dan modal alam. Musavengane and Matikiti (2015) menyatakan modal sosial menjadi rute akumulasi modal lain untuk meningkatkan performa ekowisata berkelanjutan. Manoppo (2020) menegaskan modal alam, modal fisik dan modal sosial merupakan sumberdaya yang berpengaruh terhadap peningkatan wisatawan sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi satu kawasan. Perspektif teoritis studi ini mengkorelasikan antara modal alam, modal manusia dan modal sosial yang merefleksikan kearifan lokal masyarakat Gayo Kampung Hakim Bale Bujang sebagai pengikat dan pendorong tindakan kolektif mereka dalam melestarikan hutan lindung Bur Telege sekaligus meningkat kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan melalui inovasi pengembangan pariwisata.

## **2.4. Kawasan Hutan Lindung dan Perkembangan Ekowisata**

Wilayah Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Dalam Egra et al., (2018), Indonesia

merupakan *megabiodiversitas*, yaitu di mana kawasan Indonesia hanya 1,3% dari kesemuanya hamparan luasnya bumi, uniknya memiliki 17% dari total keseluruhan spesies yang ada di bumi. Aneka ragam fauna dan flora di Indonesia terfokus pada kekayaan di hutan tropiknya, dimana 63% luas daratan Indonesia tertutup oleh hutan baik pada dataran rendah maupun dataran tinggi. Pada hutan-hutan tersebut dapat ditemukan berbagai macam tumbuhan, misalkan tumbuhan merambat, juga terdapat pepohonan dengan berbagai ukurannya. Selama ini wilayah-wilayah dengan keberadaan ekosistem endemik berada dalam wilayah kawasan hutan lindung.

Menurut Kamil et al., (2021), kawasan hutan lindung Bur Telege, merupakan kawasan hutan yang sudah mulai dieksplorasi oleh penduduk Aceh Tengah Provinsi Aceh. Meskipun memiliki status sebagai hutan lindung menjadikan semua kegiatan eksplorasi serta penggunaan hasil hutan telah di batasi dan ia difungsikan tunggal sebagaimana hutan lindung, yang telah memiliki fungsi untuk menjaga peyeimbangan alam. Permasalahan ini juga mendapat perhatian dalam UU RI Nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan, bahwasanya wilayah hutan lindung itu adalah daerah yang dinyatakan hutan mempunyai peran atau fungsi pokok yaitu sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, tujuannya mengatur mencegah banjir, tata air, pengendali erosi dan memelihara menjaga kesuburan pertanahan.

Sejauh ini sangatlah penting pengetahuan terhadap status lahan kawasan hutan lindung bagi masyarakat, supaya kedepannya hutan lindung tetap dapat dipertahankan karena berfungsi sebagai pelindung kawasan budidaya. Secara partisipatif, pengelolaan hutan lindung telah diamanatkan melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/

KPTS/Dir/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus). Menurut Hidayat et al., (2017), PHBM adalah sebuah program yang melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui sebuah lembaga swadaya yang dibentuk bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Dijalankan dengan prinsip bersama, berdaya dan berbagi dalam pengelolaan lahan, waktu dan hasilnya. Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya hutan saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta menyadari tanggungjawab sosial.

Meskipun bagi masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, kesadaran tentang pengelolaan hutan mulai tumbuh sebelum Undang-undang itu ada. Selama ini masyarakat mengenalnya sebagai hutan adat yang harus terus dipelihara dan dijaga. Sehingga ketika ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat melalui pengembangan ekowisata, ini menjadi sebuah harapan baru untuk pengembangan model pelestarian hutan yang berbasis usaha ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Menurut Kamil et al., (2021) alih fungsi lahan dapat dimaknai sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsi sebelumnya, namun kerjasama masyarakat Desa Hakim Bale Bujang terkait alih fungsi lahan sebagai lokasi wisata tidaklah berubah fungsinya dalam konotasi negatif. Hal ini terpatrit dari model yang dikelola dengan model kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat Gayo. Selama ini ekowisata berbasis masyarakat menemukan signifikansinya sebagai satu model yang mampu memproteksi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya dari ancaman kehancuran sebagai resiko yang muncul akibat pengembangan pariwisata. Atas dasar ini, pengembangan ekowisata

berbasis masyarakat adalah urgen untuk diamankan oleh para pelaku pariwisata. Selain memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat di kawasan konservasi, juga mampu menekan dan mencegah dampak negatif terhadap sumber daya alam di kawasan tersebut (Drumm & Moore, 2005).

## **2.5. Ekonomi Hijau dalam Pengembangan Ekowisata**

Paradigma ekowisata dipahami sebagai kombinasi dialektis antara keramahan terhadap lingkungan dan pengembangan kepariwisataan. Kombinasi ini meniscayakan keterlibatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata, sehingga masyarakat menjadi pihak utama yang memperoleh keuntungan optimal secara ekonomi dalam proses perkembangan pariwisata. Filosofi ini menjadi dasar terbentuknya praktik pariwisata yang berkelanjutan lintas generasi karena ekologinya tetap terjaga (Hijriati & Mardiana, 2015). Melalui pelaksanaan prinsip ekowisata ini sumberdaya alam dapat terkonservasi, utamanya terlindungnya keanekaragaman hayati sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Eksistensi ekologi ini memberikan manfaat ganda bagi wisatawan dan para aktor yang terlibat dalam kepariwisataan. Bagi wisatawan akan memperoleh pengalaman ekologis yang unik, sementara bagi para pihak penggerak wisata dapat memperoleh manfaat ekonomi optimal.

Sebagai pariwisata yang ramah lingkungan, paradigma ekowisata merupakan pariwisata berkelanjutan yang dapat dikembangkan sebagai industri pariwisata. Satu sisi pariwisata ini memberi dampak destruksi lingkungan yang minimal, namun disisi lain justru memberikan manfaat ekonomi optimal. Pelbagai lapangan pekerjaan terbuka sehingga

dapat mendorong persebaran kesejahteraan masyarakat baik yang terlibat langsung dalam proses aktivitas pariwisata maupun yang tidak. Masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dapat memperoleh kemanfaatan ekonomi melalui tetesan perputaran uang pada sektor-sektor terkait dengan kebutuhan parawisata seperti kuliner, seni, hiburan, kerajinan, maupun penginapan. Agar industri pariwisata berbasis ekowisata dapat dikembangkan secara optimal dibutuhkan kesadaran ekologis yang tinggi dari masyarakat. Paralel dengan rasionalitas tersebut dibutuhkan program-program edukasi dan transformatif yang bersifat menggugah kesadaran masyarakat lokal secara kolektif untuk menjaga dan terlibat dalam konservasi ekologis.

Meskipun demikian, pada tataran kepariwisataan, pariwisata berbasis ekowisata di Indonesia saat ini mengalami perkembangan pesat dan menggembirakan. Ditengah-tengah pesatnya perkembangan pelbagai jenis pariwisata seperti pariwisata Olah Raga, Pariwisata Hiburan, Pariwisata Belanja dan Pariwisata Kuliner. Industri Pariwisata Ekologis justru yang paling banyak diminati. Realitasnya, ekowisata mempunyai pasar tersendiri dan semakin bertambah peminatnya. Bentuk ekowisata yang paling digemari saat ini antara lain, jelajahan hutan rimba, arungan jeram, panjatan tebing, pendakian gunung, dan penelusuran gua, (Rijal et al., 2020).

Pada konteks Aceh, salah satu ekowisata yang digemari dan berkembang pesat saat ini adalah ekowisata Bur Telege yang terletak di dataran tinggi Kabupaten Aceh Tengah. Menjadi lebih menarik lokasi ekowisata ini berada dalam kawasan hutan lindung namun pesatnya perkembangan pariwisata dan tingginya kesadaran masyarakat untuk menjaga keasrian hutan lindung membuat ekologi kawasan lindung

ini tetap terjaga keasriannya. Pariwisata Bur Telege ini merupakan geowisata, yaitu wisata dengan minat khusus dan wisata alternatif yang relatif baru dari wisata alam yang dapat dijadikan sebagai konsep ekowisata berkelanjutan.

Geowisata sebagai wisata alternatif di sekitar dataran tinggi Takengon dan Bener Meriah banyak menarik minat pengunjung yang cenderung mulai jenuh dengan wisata-wisata lainnya di sekitar perkotaan, seperti wisata berbelanja di *factory outlet*, atau distro, atau berwisata kuliner. Geowisata seperti Hutan Lindung Bur Telege yang terletak di perbukitan dataran tinggi tidak hanya menawarkan pemandangan menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan makna pada pemandangan atau fenomena alam. Perjalanan wisatawan menyusuri objek wisata tersebut tidak hanya sekedar untuk jalan-jalan, berfoto, makan, dan kemudian pulang. Melebihi itu, para wisatawan juga disuguhkan pengetahuan dan informasi oleh pemandu lapangan lewat penuturannya, baik secara lisan maupun tertulis (Serambinews, 2022). Selain itu, alamnya yang unik dan keramahan masyarakat Gayo yang mendiami kawasan dataran tinggi Bur Telege dapat dijadikan sebagai pengalaman emosional dan spiritual yang tidak terlupakan bagi para pengunjung.

## **2.6. Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan**

Kebudayaan tradisional pada suatu tempat memiliki keterikatan dengan kearifan lokal. Sehingga dalam kearifan lokal tersebut terkandung banyak pandangan dan aturan sebagai dasar masyarakat dalam bertindak maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Etika maupun nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal pada umumnya telah diajarkan secara turun-temurun dan diwariskan dari



generasi ke generasi melalui sastra lisan (di antaranya dalam bentuk pepatah, peribahasa, maupun cerita rakyat/*folklore*). Adapun manuskrip kearifan lokal yang diajarkan secara turun-temurun tersebut merupakan kebudayaan yang musti dijaga. Pada dasarnya, setiap wilayah memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khasnya maupun kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.

Menurut Yusutria et al., (2018) kearifan lokal adalah ide-ide lokal yang baik dan bijak serta penuh kearifan, yang tertanam dan diikuti seluruh anggota komunitas. Sedangkan Permana et al., (2011), memahami kearifan lokal sebagai pengetahuan tradisional yang dijadikan sebagai rujukan perilaku sehingga dipraktikkan secara lintas generasi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dan mengatasi tantangan kehidupan masyarakat. Pada konteks eksistensi ekologis, pengetahuan yang berbasis pada kearifan lokal dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memfasilitasi proses pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana alam yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan (Jha & Jha, 2011). Pada tataran empiris, pengetahuan tersebut bahkan telah diterapkan oleh masyarakat selama berabad-abad dalam mengatasi bencana alam (Macnight Ngwese et al., 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah modal sosial bagi masyarakat untuk mengatasi berbagai persoalan hidupnya, termasuk dalam menangani dampak bencana alam. Selanjutnya, kearifan lokal dalam keberlangsungannya dapat berkaitan dengan masa lalu, sekarang, dan bahkan tentang masa depan. Oleh sebab itu, kearifan lokal identik dengan dinamika, transformasi, dan reproduksi.

Adapun modal sosial merupakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma, nilai-nilai dan etika yang memfasilitasi kerja sama masyarakat dalam melakukan pembangunan, terbentuk melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberi kekuatan atau daya kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Modal sosial dalam bentuk kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan ke dalam kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggungjawab, sistem penghargaan dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Modal sosial timbul dari interaksi suatu komunitas atau masyarakat. Pengukurannya dapat dilihat dari interaksi baik individual dan institusional, seperti tingkat kepercayaan antar warga masyarakat.

Menurut Bourdieu, modal sosial dapat mencakup hal-hal material yang dapat memiliki nilai simbolis dan memiliki signifikansi secara kultural (Bourdieu, 2018; Fashri, 2019; Harker et al., 2009). Modal sosial juga merupakan sekumpulan sumber daya dan kekuasaan yang dapat berfungsi untuk pembangunan masyarakat yang bermartabat. Modal juga dapat dipahami sebagai relasi sosial yang terdapat dalam sistem pertukaran, yaitu pertukaran dalam bentuk material maupun simbol, dapat berwujud dalam bentuk praktis atau terlembagakan. Keduanya diproduksi dan direproduksi melalui pertukaran.

Bourdieu (dalam Afwan, 2015) menyebut modal sosial memiliki tiga unsur utama, yaitu; (1) hubungan sosial yang memfasilitasi aktor memperoleh akses ke sumber daya; (2) totalitas sumber daya yang diperoleh dari hubungan para aktor; dan (3) kualitas sumber daya tersebut. Pada konteks ini, modal sosial dapat dimiliki individu maupun masyarakat melalui pelbagai kerjasama sehingga terbentuk jaringan dan

kepercayaan yang didukung oleh nilai-nilai dan norma-norma sosial yang memudahkan pencapaian tujuan bersama. Pada konteks konseptual ini, kearifan lokal masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang yang praktikkan dalam pengelolaan hutan dapat disebut sebagai modal sosial.

Kearifan lokal masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang sangatlah populer di masyarakat Aceh Tengah, hal tersebut terpatri dari berbagai penghargaan yang diraih oleh Reje Kampung HBB. Kearifan lokal merupakan konsep yang menekankan pentingnya “dinamika” (Afwan, 2015). Sebagai konsep yang dinamis, kearifan lokal selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan tantangan dan peluang serta terus beradaptasi dengan pelbagai konteks dan bertransformasi untuk dapat menjawab persoalan dan memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, kearifan lokal adalah tentang perubahan sekaligus keberlanjutan.

Ketiga aspek kearifan lokal itu memperantai konstruksi tata nilai, tata pikir dan tata perilaku masyarakat lokal dalam mengarungi dinamika kehidupan mereka termasuk inter relasinya dalam menjaga dan melestarikan hutan sebagai bagian utama ekologi kehidupan mereka. Arus desakan perubahan tata pikir sebagai konsekuensi perubahan tatanan global dalam memandang kehidupan tiap saat menekan untuk merubah cara pandang kehidupan terutama pada aspek bagaimana memposisikan alam untuk mendukung kesejahteraan ekonomi secara pragmatik. Namun, kekuatan tata nilai yang berkearifan mampu menjadi perisai yang menghadang munculnya perilaku pragmatik yang eksploitatif terhadap alam.

## **2.7. Pemanfaatan Kearifan Lokal dan Modal Sosial dan Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan**

Pemanfaatan kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendukung pengembangan ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan pemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep modal sosial dan aksi kolektif mulai mendapat perhatian dalam pengelolaan sumberdaya alam bersama (*common pool resources*), seperti halnya Bur Telege dieksplorasi menjadi kawasan wisata yang berbasis hutan lindung. Wujud modal sosial dalam studi ini adalah kepemimpinan sosial, adat/ nilai budaya/kearifan lokal masyarakat Hakim Bale Bujang. Menurut Ekawati & Nurrochmat (2014) mengatakan wujud nyata dari modal sosial adalah kepemimpinan sosial. Kearifan lokal masyarakat adalah salah satu potensi dalam mendorong keberlangsungan hidup ditengah keterbatasan modal dan peralatan. Sehingga dapat dimaknai bahwa kearifan lokal yang berasal dari sumber daya alam merupakan salah satu potensi yang mampu menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Pemanfaatan kearifan lokal melalui pengelolaan hutan lindung merupakan salah satu upaya masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal berbasis kearifan lokal. Selain potensi alam dalam hal sosial budaya yakni tradisi jaga hutan dan pengetahuan tentang pengelolaan hutan juga merupakan bentuk kearifan lokal Kampung Hakim Bale Bujang yang digunakan untuk memaksimalkan program pengembangan ekowisata berkelanjutan.

Bentuk kearifan lokal tersebut adalah tradisi penjagaan hutan dan sikap kekeluargaan dan gotong royong antar warga dalam menjaga dari berbagai tindakan merusak hutan. Dari sini nantinya pembaca akan

mengetahui bagaimana potret kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang sebagai bentuk identitas suatu daerah. Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan secara rinci mengenai eksistensi penguatan fungsi keluarga melalui strategi pewarisan pengetahuan tentang pengelolaan dan menjaga hutan.

# BAB III

---

## METODE DAN PROSES ANALISIS DATA

---

### 1.1. Lokasi Penelitian

Selain sebagai sentra penghasil kopi terbaik di Indonesia dan salah satu yang terbaik di dunia, Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh merupakan sentra pariwisata ekologi di Aceh. Keindahan alamnya menjadi magnet yang menarik kunjungan para penikmat keasrian alam disentaro penjuru baik lokal, nasional dan mancanegara. Berbeda dengan sentra-sentra pariwisata Aceh Tengah umumnya yang konstruksi, pengembangan dan penjagaan keberlanjutannya dilakukan oleh satu dua pemiliknya dengan manajemen modern, pariwisata Bur Telege adalah pariwisata milik orang kampung Hakim Bale Bujang. Pariwisata ini diinisiasi dan dibangun secara kolektif, dijaga, dirawat, dikembangkan

dan dilestarikan keberlanjutannya oleh agensi kolektif masyarakat yang digerakkan oleh energi pengetahuan kearifan lokal mereka yang menjadi modal sosial bersama.

Kenyataan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk memahami dan mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal mereka dimobilisasi sebagai modal sosial yang dapat menggerakkan pengembangan pariwisata dan pada sisi lain ekologi hutan lindung tetap dapat terjaga. Rasionalitas ini menjadi argumentasi utama mengapa lokasi ini dipilih sebagai lokasi studi. Secara demografis, masyarakat kampung Hakim Bale Bujang adalah masyarakat yang beretnis Gayo yang memiliki karakteristik sosial-budaya tersendiri yang berbeda dengan para peneliti.

Perbedaan kebudayaan ini meniscayakan ketersediaan “jembatan” yang dapat menghubungkan para peneliti dengan para subjek penelitian agar para peneliti dapat “diterima” oleh mereka sehingga memudahkan eksplorasi terhadap pelbagai aspek yang menjadi fokus studi. Pada ranah ini peneliti secara khusus menempatkan beberapa anggota tim dari kawasan yang sama dengan lokasi studi agar dapat menjembati kesulitan beradaptasi dan memahami pemahaman kebudayaan masyarakat yang diteliti.

Studi ini melibatkan para aparatur pemerintahan kampung Bale Bujang, pengurus BUMK (Badan Usaha Milik Kampung), tokoh adat (Tetua), Representasi pemuda dan anggota masyarakat kampung Hakim Bale Bujang Aceh Tengah Propinsi Aceh sebagai subjek penelitian. Mereka dipilih karena memiliki kekayaan pengetahuan tentang budaya dan kearifan lokal setempat, mendiami kawasan hutan lindung Bur Telege dan terlibat dalam memanfaatkan hutan tersebut secara berkelanjutan

berdasarkan kearifan lokal yang mereka ketahui dan rujuk dalam perilaku yang dinilai sesuai dengan konsep ekonomi hijau.

### **3.2. Informan Penelitian**

Fenomena sosial tidak hanya berada dalam dunia objektif tetapi juga dalam pikiran para aktornya. Maka, informan merupakan keniscayaan dalam penelitian kualitatif (Aguinis & Solarino, 2019). Pengetahuan subjektif pelaku sosial yang bertaut dengan pengetahuan subjektif pelaku sosial lainnya menjadi kesadaran intersubjektif yang melahirkan tindakan-tindakan yang dapat diamati secara objektif. Tidak semua aktor memiliki kekayaan pengetahuan yang sama.

Selalu saja terdapat aktor-aktor tertentu yang memiliki kekayaan informasi lebih banyak dari yang lainnya. Secara sosial, hal ini dapat didorong oleh bakat alamiah, pengalaman interaksi, maupun kedudukan dan profesi para pelaku. Terkait dengan argumentasi tersebut dalam studi ini informan yang dipilih terdiri dari Reje (Kepala Desa), Pimpinan UPT. KPH Wilayah V Aceh, Majelis Adat Gayo, Tetua Adat (Sarak Opat), Tokoh Pemuda, Pengelola Pariwisata, wisatawan, Akademisi dan masyarakat.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Live In**

Proses pengumpulan data diawali dengan *Live in*, yaitu tinggal bersama masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Peneliti tinggal selain di Kawasan kampung Hakim Bale Bujang juga di kawasan Lut Tawar yang dekat dengan lokasi Pariwisata Bur Telege. Interaksi dengan warga Hakim Bale Bujang mendekatkan peneliti sementara interaksi



dengan warga tetangga kampung Hakim Bale Bujung untuk menggali informasi tentang karakter dan budaya masyarakat Hakim Bale Bujung agar memahami cara terbaik agar dapat diterima oleh mereka.

Strategi ini sengaja dilakukan untuk mendekatkan para peneliti dengan sasaran subjek penelitian. Hambatan budaya, hambatan emosional dan psikologis dapat berubah menjadi “kita semua bersaudara”. Selain sebagai instrument untuk mendekatkan diri peneliti dengan subjek penelitian. Metode ini dilakukan juga berorientasi agar peneliti memiliki imajinasi sosiologis tentang nilai-nilai, pola-pola, budaya-budaya, (Benson & O’Reilly, 2022) dan bentuk-bentuk kearifan lokal yang dimobilisasi oleh para aktor dalam menjaga kelestarian dan menggerakkan pariwisata di hutan lindung Bur Telege.

Melalui live in ini tokoh-tokoh dominan dengan pengetahuan yang lebih kaya dibanding yang lain mulai dipetakan dan dijadikan sebagai calon informan. Agar menjadi tepat sasaran para informan pada akhirnya ditentukan setelah dilakukan observasi.

## **b. Observasi**

Melalui observasi peneliti mengumpulkan data terkait dengan siapa aktor yang memiliki pengetahuan dominan, apa yang disampaikan, bagaimana respon lawan bicaranya, bagaimana praktik-praktik tindakan komunitas, apa saja yang menonjol dalam diskusi warga dan fenomena-fenomena dominan lainnya. Maka, secara garis besar observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang subjek, tindakan dan peristiwa menonjol (Busetto et al., 2020).

Tidak kalah pentingnya melalui metode observasi ini para informan ditentukan. Calon informan yang telah dipetakan saat live in setelah di observasi ternyata tidak memiliki kekayaan informasi sebagaimana di duga “batal” dijadikan informan, sebaliknya setelah dalam observasi figur yang telah ditetapkan sebagai calon informan ternyata benar memiliki pengetahuan yang lebih kaya dibanding yang lain dijadikan sebagai informan.

Maka, pada akhirnya informan yang dipilih dalam studi ini adalah Reje (Kepala Desa) dan Tetua Kampung Hakim Bale Bujang, Pimpinan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), Pimpinan UPT. KPH Wilayah V Aceh, Majelis Adat Gayo, Tetua Adat (Sarak Opat), 5 (Lima) orang Tokoh Pemuda, 3 (Tiga) orang Pengelola Pariwisata, 10 (Sepuluh) orang wisatawan, 2 (Dua) orang Akademisi dan 15 (Lima Belas) orang anggota masyarakat biasa.

### **c. Wawancara Mendalam**

Para aktor dominan yang teridentifikasi sebagai figur kaya informasi dalam observasi dijadikan informan kunci. Terhadap mereka, peneliti melakukan wawancara mendalam (Lucas, 2014). Wawancara mendalam diarahkan untuk mengumpulkan data terkait nilai-nilai kearifan lokal dan praktik sosial dalam pemanfaatan hutan lindung Bur Telege sebagai sumberdaya ekonomi berkelanjutan. Pengetahuan bersama mereka tentang eksistensi hutan Lindung Bur Telege dalam kehidupan masyarakat kampung Hakim Bale Bujang menjadi isu sentral yang dieksplorasi.

Tidak kalah pentingnya, pada wawancara mendalam ini peneliti juga menggali pengetahuan informan terkait dengan kearifan lokal mereka pada masa lalu, masa kini dan harapan di masa depan. Strategi tentang

bagaimana menjaga dan mempertahankan pengetahuan tentang kearifan lokal lintas generasi terutama generasi mudanya menjadi hal yang urgen pula digali melalui metode ini.

#### **d. Focus Group Discussion**

Untuk memperdalam dan menghindari data bias dari wawancara mendalam, para informan yang telah diwawancara mendalam dipertemukan dalam forum bersama untuk dilakukan FGD. Pada observasi dan wawancara mendalam data bersifat personal, dalam FGD datanya bersifat kolektif dan handal (Basnet, 2018). Pada metode ini peneliti hanya menjadi pemantik diskusi tidak berpretensi sebagai seolah-olah aktor yang telah memiliki banyak pengetahuan terkait dengan kearifan lokal baik teoritis maupun apalagi praktisnya.

Prinsipnya para pesertalah yang lebih tahu dan peneliti “tidak Tahu”. Peserta FGD diberi keleluasaan penuh dalam mengeluarkan seluruh pengetahuan yang mereka miliki. Perbedaan pandangan dari para peserta justeru sangat diharapkan karena secara tidak disadari hal ini memberi data “baru” bagi peneliti.

#### **e. Pemanfaatan Dokumen**

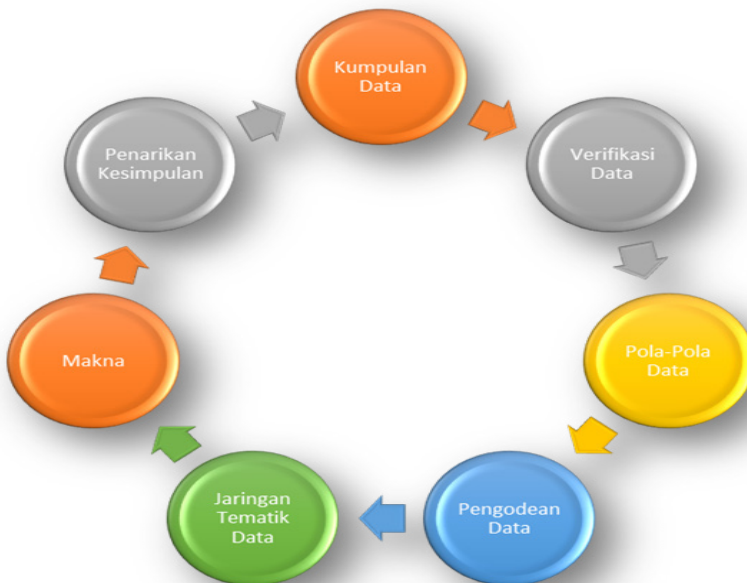
Dokumen terdiri dari buku, qanun, memo, pengumuman, instruksi, laporan rapat, keputusan pemimpin, jurnal, koran, buletin dan catatan-catatan lain yang relevan dengan tema penelitian dimanfaatkan sebagai pengayaan data. Dokumen-dokumen tersebut dipahami melalui proses dekonstruksi, rekonstruksi dan Pemaknaan.

Seluruh dokumen tersebut dimanfaatkan sebagai data sekunder untuk memperkaya data primer yang diperoleh melalui obesrvasi, wawancara mendalam dan FGD meskipun FG lebih dimaknai sebagai mekanisme verifikasi data agar data yang dijadikan data benar-benar handal karena telah teruji lewat diskusi dengan multi perspektif dan tafsir.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif dan interaktif. Proses analisis ini sudah dimulai sejak awal penelitian, data dianalisis dari setiap bagian untuk kemudian dihubungkan dengan data lainnya. Prosesnya secara bertahap, dengan tahapan; pengumpulan data, verifikasi data, pola data, pengodean, jaringan tematik, pemaknaan dan penarikan kesimpulan (Akinyode & Khan, 2018). Proses analisis data divisualisasikan sebagai berikut.

**Gambar. 4: Proses Analisis Data**





# BAB IV

---

## MASYARAKAT HAKIM BALE BUJANG DAN EKOWISATA BUR TELEGE

---

### 4.1. Profil Masyarakat Hakim Bale Bujang

Kampung Hakim Bale Bujang masyarakatnya merupakan dari etnis Gayo tempatan yang tertua menetap di kabupaten Aceh Tengah. Kampung ini terbelah menjadi *Krueng Peusangan* dan Pegunungan Bur Telege yaitu terletak di wilayah kecamatan Lut Tawar. Berdasarkan dari Adlin (2022) tempat Kampung Hakim Bale Bujang adalah termasuk dalam Kampung tertua serta pertama sekali ada di Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaan Kampung ini dengan demikian telah ada semenjak zaman penjajahan hegemoni dari negara Belanda juga Jepang. Pada era kolonialisme Belanda, Kampung Hakim Bale Bujang ini telah terjadi pemindahan tempatnya oleh pasukan Morsose. Pertama sekali lokasi di

Pendopo Bupati, dan kemudian di pindahkan ke Tangse (atau pada saat ini kawasan tersebut adalah berada di SMP 2 Takengon) dan akhirnya bertempat kawasan berlokasi di Kampung saat ini di bawah kaki Bur Telege.



Gambar. 3. Bur Telege

Masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang menetap pada pemukiman lereng pengunungan dengan ketinggian 1250-1400 Mdp, berdasarkan klimatologi Kampung tersebut memiliki suhu yang dingin, dengan rata-rata kisaran kurang-lebih 20° C atau sebandingn 68° F. Secara keseluruhan Penduduk Bale Bujang sama seperti dengan keberadaan suku-suku bangsa sebagai etnis tempatan (*host ethnics*) pada wilayah lain di Aceh, diantaranya Gayo, Suku Jawa, Aceh, Suku Batak dan Suku Padang. Suku Gayo menjadi yang paling mendominasi sebagai salah satu suku yang memiliki individu pribumi berada di Aceh Tengah (Profil Kampung Hakim Bale Bujang, 2021).

#### 4.1.1. Letak Geografis

Secara administratif Kampung Hakim Bale Bujang masuk dalam pemerintahan Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Secara geografis di Kampung ini luas wilayahnya berkisar 11 Km<sup>2</sup>. Jika di lihat batas-batasan dari Kampung Hakim Bale Bujang ini maka dapat di gambarkan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Takengon Timur
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Teluk One-one
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kampung Bujang
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampung Asir-Asir Asia

Berdasarkan batas-batas wilayah Kampung Hakim Bale Bujang dengan masing-masing wilayah memiliki beragam kelebihan dari batas kampung tersebut. Hal ini semakin memperkuat keistimewaan dari setiap wilayah tersebut dengan ciri khasnya suhu udara dingin.

#### 4.1.2. Demografi Sosial

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk**

**Di Kampung Hakim Bale Bujang Tahun 2021**

No	Dusun	Jumlah Penduduk			
		Lk	Pr	Jumlah (Jiwa)	KK
1	2	3	4	5	6
01	Ujung	150	165	315	162
02	Ralik	157	150	307	128
03	Bale Paluh	180	184	364	108



04	Hakim	135	167	302	98
05	Dedalu	326	356	682	268
Jumlah		948	1022	1970	764

Secara umum keberadaan jumlah penduduk Kampung Hakim Bale Bujang berjumlah 1.970 Jiwa dengan Laki-laki sebanyak 948 Jiwa dan Perempuan sebanyak 1.022 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 764 KK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di atas.

#### **4.1.3. Etnik Masyarakat Hakim Bale Bujang**

Kampung Hakim Bale Bujang dapat dikategorikan kepada suatu daerah yang bersifat terbuka, plural dan toleran. Keterbukaannya terhadap masyarakat lain dapat dibuktikan dengan berbagai peninggalan sejarah, baik yang terdapat pada zaman prasejarah maupun pada jaman sejarah. Nampaknya hubungan dengan piha luar telah dibangun secara berkesinambungan. Hal ini terbukti dari perkembangan hubungan kebudayaan, perdagangan, dan politik dengan etnik-etnik lain dari luar tanah Gayo. Kehadiran berbagai etnis dalam masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang dapat terlihat dari penampakan ciri-ciri kultur etnis mereka dan bersifat unik dalam satu wilayah, seperti etnik Aceh, Tionghoa, Jawa, Batak, dan lain sebagainya. Hal tersebut bukan saja memudahkan orang lain untuk mengenalinya, namun juga sebagai suatu strategi dalam mempertahankan identitas sosiokultural dan menciptakan keamanan sosial.

Kedatangan dari beranekaragam macam etnis ke Kampung Hakim Bale Bujang telah nampak sejak zaman sebelum kemerdekaan. Hal tersebut dapat ditemukan dari berbagai berita-berita yang menyebutkan

bahwa pada masa perang antara Belanda banyak etnis atau suku lain yang dilakukan pengasingan ke wilayah Takengon dan sekitarnya. Keberadaannya terus berlanjut sejalan dengan dinamika sejarah masyarakat Aceh Tengah. Hal tersebut dapat ditemukan dari peninggalan-peninggalan dalam bentuk budaya, tempat tinggal, rumah ibadah, kelompok masyarakat etnik, dan lain sebagainya yang mencerminkan etnisitas tertentu.

Secara umum keberadaan penduduk Kampung Hakim Bale Bujang memiliki klasifikasi suku bangsa yang cukup beragam. Menurut Koentjaraningrat (1993), suku bangsa adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh satu budaya secara sadar dan terikat dengan kesamaan identitas. Kesadaran dan identitas ini kemudian memperkuat kesatuan antar masyarakat. Mayoritas penduduk Kampung Hakim Bale Bujang beragama Islam, namun ada sebagian kecil yang beragama Kristen Protestan. Walaupun demikian, masyarakat minoritas tidak dimarginalkan dan tidak mendapat perlakuan negatif dari masyarakat mayoritas. Tidak seperti di daerah lainya di Indonesia, masih ditemukan *statement* dan sikap yang mendiskreditkan minoritas yang menggambarkan intoleransi terhadap etnis dan agama tertentu. Di Kampung Hakim Bale Bujang, secara keseluruhan masyarakat hidup dengan damai dan penuh toleransi.



Gambar 1. Gereja Kristen Protestan

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat tempat ibadah Kristen Protestan di Kampung Hakim Bale Bujang. Hal tersebut adalah salah satu bentuk toleransi masyarakat kampung Hakim Bale Bujang sebagai mayoritas Muslim terhadap masyarakat yang minoritas beragama Kristen. Selain itu sikap toleransi juga diwujudkan dalam hubungan relasi sosial antar masyarakat yang hidup berdampingan serta rukun membangun hubungan sosial antar sesama masyarakat minoritas. Sementara itu keberagaman Seni dan Budaya yang tercipta berasal dari penduduk Kampung Hakim Bale Bujang yang terdiri dari sebagian besar Suku Gayo dan sebagian kecil Suku Aceh. Akan tetapi, karya budaya yang terbentuk dari kreatifitas masyarakat belum terbina secara intensif yang mengakibatkan lemahnya semangat budayawan dan seniman dalam berkreas (Wawancara Misriadi, 2022).

Suku Gayo termasuk tekun beribadah dan fanatik terhadap Agama Islam, sehingga dalam semua aspek bersifat Theokrasi (bersandarkan ajaran Agama Islam), baik itu terkait budaya, adat, sistem pendidikan

adalah berlandaskan Islam. Berdasarkan pandangan Ibrahim (2007) ketika agama belum masuk ke daerah Gayo, penduduk setempat telah menyakini sistem kepercayaan animisme. Awal mula Islam masuk di daerah Pereulak Aceh abad ke VIII Masehi, masa itu suku Gayo yang tinggal di Pereulak secara berangsur-angsur mulai memeluk agama Islam.



Gambar 2. Mesjid At-Taqwa Kampung Hakim Bale Bujang

Keberadaan mesjid At-Taqwa Kampung Hakim Bale Bujang (HBB) yang terletak diirisan sungai peusangan dan di bawah lereng gunung Bur Telege. Simbol ini merupakan salah satu icon bahwa masyarakat Kampung HBB merupakan masyarakat yang taat dan memegang teguh nilai-nilai agama sebagai pola kehidupannya. Nilai-nilai agama juga menjadi sesuatu yang prinsipil terhadap cara berkehidupan bagi masyarakat yang menetap di kawasan Bur Telege.

Adanya keragaman budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi inspirasi para tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat kampung untuk membuat kegiatan budaya yang bertujuan memberikan

pengetahuan tentang keragaman budaya. Hal tersebut karena penduduk yang menetap di Kampung Hakim Bale Bujang mayoritasnya merupakan suku Gayo dengan kekhasan budaya dan bahasanya. Sementara dalam lingkup Provinsi Aceh mayoritas penduduk berasal dari suku Aceh memiliki ciri khas budaya dan bahasanya sendiri. Mereka tersebar ke seluruh pelosok Aceh, termasuk di Hakim Bale Bujang. Oleh sebab itu, semua jenis budaya yang tumbuh dan berkembang dari berbagai macam suku yang terintegrasi dalam satu wilayah perlu difahami secara benar dan dihormati oleh semua penduduk.

Dengan demikian, integrasi budaya berdampak positif bagi pembangunan Hakim Bale Bujang secara khusus dan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah umumnya. Hal ini bermakna budaya lokal telah menjadi pendukung dalam mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara budaya luar yang dianggap kurang baik karena tidak sesuai dengan hukum Islam tetap ditolak namun unsur budaya eksternal yang dinilai baik akan diterima.

Di antara produk budaya unik masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang adalah Seni Tari dan Didong (Suku Gayo). Kedua budaya tersebut dipertandingkan secara berkala sehingga mampu mendorong tumbuhnya minat para generasi muda untuk berkarya dan menjadi seniman dan budayawan. Sedangkan sastra tradisional yang hampir punah, dijadikan prioritas dalam pengembangan melalui berbagai kompetisi dan festival, pembinaan, maupun pelatihan melalui pendidikan formal, non-formal dan informal. Ini dipandang penting karena corak kesenian amat dibutuhkan demi langgengnya kebudayaan lokal. Keberadaan Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) merupakan hal yang krusial sebagai kawah candradimuka pengembangan pelbagai kesenian masyarakat Gayo.

Jika tidak dilakukan hal tersebut sangat memungkinkan budaya lokal terancam punah. Mengingat era reformasi dan demokratisasi telah membuka peluang yang luas untuk menggantikan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat yang sudah menjadi kearifan lokal. Integrasi berbagai budaya akibat keterbukaan global bisa berakibat buruk terhadap ketahanan budaya daerah jika identitas suatu masyarakat tidak kuat. Oleh sebab itu, jika kondisi seperti ini dibiarkan terjadi terus-menerus, dikhawatirkan akan menurunkan nilai moral maupun nilai leluhur yang berakibat menurunnya martabat masyarakat lokal.

Salah satu lembaga kampung/desa yang potensial untuk memelihara nilai budaya, norma dalam masyarakat adalah Rakyat Genap Mufakat (RGM). Lembaga ini dapat memanfaatkan nilai dan norma yang berlaku dalam melayani masyarakat di lapangan. Tugasnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, ketertiban umum, dan penyelenggaraan ketertiban umum. Melalui lembaga ini aparat pemerintah desa memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan hal tersebut, jadi tidak memiliki masalah atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Wawancara Edi, 2022).

Selain budaya, pembangunan juga mensyaratkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan pendidikan yang dapat mendorong masyarakat memenuhi kebutuhan secara keseluruhannya secara adil dan berkelanjutan. Salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan adalah terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelbagai proses pembangunan. Oleh sebab itu, salah satu tugas utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah adalah dengan menyediakan sarana dan infrastruktur pendidikan yang memadai bagi pelbagai tingkatan. Kenyataan ini sekaligus menjadi indikator penting untuk menentukan perkembangan suatu daerah.

Adapun kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kampung Hakim Bale Bujang merupakan hal yang mendesak untuk dipenuhi. Pada saat ini sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia, sebagai berikut: 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1 Taman Kanak-kanak (TK) yang berstatus Swasta, dan 1 Sekolah Dasar (SD) berstatus Negeri. Kondisi ini dipandang sudah memadai untuk menampung siswa yang dari desa/kampung HBB untuk proses pembelajaran, baik aktivitas kurikuler maupun ekstrakurikuler pelbagai program pendidikan (Profil Kampung Hakim Bale Bujang, 2021).

#### **4.1.4. Pekerjaan dan Mata Pencaharian**

Masyarakat HBB yang termasuk ke dalam kategori usia produktif jumlahnya mencapai 970 orang, sementara usia non produktif adalah 1.000 orang. Yang dimaksudkan dengan usia produktif adalah mereka yang berumur dengan rentang usia dari 16-50 tahun. Pada usia ini, seseorang masih bersekolah, bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud usia non produktif merupakan rentang usia seseorang yang tidak bersekolah, tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan.

Kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya mempengaruhi atau menentukan hubungan antara manusia dengan lingkungan sosial dan alam yang kompleks. Pelbagai usaha dilakukan pemerintah kampung, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam memperbaiki kesejahteraan guna mengurangi angkat kemiskinan, anomali sosial, kriminalitas, tindakan asusila dan perilaku patologi sosial lainnya (Profil Kampung Hakim Bale Bujang, 2021).

**Tabel 4.2 Mata Pencaharian Masyarakat  
Di Kampung Hakim Bale Bujang Tahun 2021**

Pegawai Negeri Sipil	115
TNI/ Polri	3
Swasta / BUMN	-
Wiraswasta / Pedagang	25
Petani	200
Nelayan	-
Peternak	63
Jasa	105
Pengrajin	17
Pekerja Seni	8
Pensiunan	45
Tidak Bekerja / Menganggur	441
Total Karyawan	970

Walaupun pelbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan, namun capaian hasil perubahan terhadap kesejahteraan belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada sisi lain, krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan residu sosial -ekonomi pasca konflik yang terus menjadi beban pemulihan menjadikan kesejahteraan sosial masyarakat semakin mengkhawatirkan di wilayah tersebut. Adapun pembangunan kesejahteraan sosial pada saat ini memiliki tantangan yaitu bagaimana mengatasi permasalahan sosial yang meningkat, khususnya kemiskinan. Selain itu juga tantangan lain bagaimana mewujudkan kondisi aman dan masyarakat memiliki perlindungan sosial. Lebih lanjut tantangan lainnya yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan melibatkan mereka dalam



menggali dan memahami isu-isu sosial untuk meningkatkan solidaritas sosial dan gotong royong, sehingga dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial secara tepat dan bijaksana.

Upaya tersebut telah memberi dampak positif terhadap perubahan sosial yang terjadi akibat pengembangan pariwisata (ekowisata) hutan lindung Bur Telege. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya variasi sumber pendapatan masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang. Secara signifikan berbeda dengan sebelum dikembangkan Bur Telege sebagai ekopariwisata. Keberadaan ekowisata saat ini menjadi sektor pendapatan terbesar di kampung Hakim Bale Bujang. Di mana sebelum adanya pariwisata, penduduk mencari nafkah sebagai petani, buruh kebun bahkan tidak sedikit yang menjadi pengangguran. Dengan ekowisata Bur Telege, masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang telah menjadikan hutan lindung sebagai daya tarik wisata dan terbuka lapangan pekerjaan baru bagi pemuda dan warga lainnya. Atas dasar ini dibentuklah satu Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk mengelola Ekowisata Bur Telege sebagai salah destinasi wisata ternama di Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Hasilnya, Bur Telege saat ini telah menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat sekitar. Secara khusus, Pendapatan BUMK dijadikan sebagai Pendapatan Asli Kampung (PAK) sehingga dapat digunakan untuk pembangunan kampung baik infrastruktur, pemberdayaan ekonomi melalui sistem simpan pinjam yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai modal dalam pengembangan ekonomi produktif dan keperluan lainnya.

#### 4.1.5. Keekerabatan dan Pola Relasi Sosial

Dalam pranata sosial, keekerabatan memiliki posisi tertinggi. Dimana kelompok keekerabatan berada pada ranah kehidupan seseorang dalam hal karir, perkawinan, maupun keamanan serta jati diri sosialnya (Eriksen, 2001). Untuk memahami aspek kehidupan yang dianggap penting dan saling berkaitan dibutuhkan prinsip keekerabatan dalam membentuk tatanan sosial dalam masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang. Aspek tersebut antara lain; perkawinan, stratifikasi sosial, kekuasaan dan pengaruh pribadi. Hubungan keekerabatan dalam masyarakat Hakim Bale Bujang disebut dengan istilah "*belah*". Sistim keekerabatan merupakan kombinasi dari beberapa keluarga batih. Pada sistim budaya *belah*, para anggotanya berasal dari satu keturunan, yang memiliki hubungan darah dan dikonsolidasikan hubungan persaudaraan melalui pelbagai aktifitas ritual adat.

Relasi sosial dapat dilihat dari stratifikasi masyarakat Gayo yang terbentuk atas dasar sistem keekerabatan tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa stratifikasi berhubungan dengan masa kelahiran, dimana mereka yang lahir terlebih dahulu memiliki hirarki lebih tinggi daripada mereka yang lahir kemudian dan seperti itu selanjutnya ke bawah. Berdasarkan hirarki tersebut maka terdapat pula aturan terkait bentuk sapaan atau panggilan yang menggambarkan strata dan tingkat kedekatan hubungan. Kedekatan hubungan ditentukan oleh hirarkhi sosial leluhur yang menghubungkan mereka, berdasarkan garis keturunan baik dari pihak bapak maupun ibu. Realitas inilah yang mempersatukan mereka ke dalam satu sistim keekerabatan juga memisahkan mereka dari satu keluarga (*tau laeng*) dengan keluarga lain (Pelras et al., 2006).

Masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang, sistem kekerabatan ini masih dipertahankan dan dijadikan sebagai pijakan dalam melaksanakan acara adat dan keagamaan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa jalur kekerabatan penting untuk dijadikan patokan. Sistem kekerabatan ini sekaligus memperlihatkan adanya ikatan ajaran leluhur pada konsep kehidupan keluarga dan sosial yang berlaku pada masyarakat HBB. Hal tersebut tercermin pada cara dalam mengambil keputusan bersama pada keluarga besar sesuai dengan pepatah adat. Adapun konsep sistem kekerabatan suku Gayo terbagi kedalam dua bagian yaitu keluarga inti (*batih*) dan keluarga luas.

Menurut Marhamah (2014), sistem keluarga yang dianut oleh Masyarakat Gayo merupakan sistem keluarga batih, yaitu rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah tinggal bersama dalam satu rumah. Ketika seorang anak sudah berkeluarga, maka ia akan membangun rumah tangganya sendiri sebagai keluarga inti yang baru. Sebelum memiliki anak, seorang anak yang baru menikah sementara akan tinggal bersama keluarga batih ayahnya. Pelbagai aktivitas pada keluarga batih adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Pelbagai aktivitas tersebut antara lain turun *keume* (turun ke sawah/ladang), yaitu bekerja di kebun dimana semua anggota keluarga inti harus ikut berpartisipasi menyelesaikannya. Diversifikasi pekerjaan disesuaikan dengan keterampilan anggota keluarga batih itu sendiri.

Selain itu pola relasi sosial masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang merupakan sebuah kampung yang mempunyai keunikan dan paling khas dibandingkan kampung-kampung lainnya di Kabupaten Aceh Tengah, bahkan di seluruh Aceh. Selain kampungnya yang terletak di wilayah pusat Kota Takengon, penduduknya Kampung HBB juga

berasal dari berbagai etnik yang ada di Indonesia. Pola relasi antar etnis menyebabkan penduduknya menerima keberagaman. Keberagaman ini menjadi wahana yang merekatkan hubungan sosial baik pada kepercayaan agama yang berbeda, etnik maupun budaya. Masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang dengan komposisi agama dan kultur yang plural, menjadi contoh representatif toleransi hubungan sosial dalam masyarakat multikultur. Kerukunan yang terbangun di Kampung HBB adalah kerukunan dan toleransi yang merupakan turunan dari filosofi dan prinsip masyarakat yang plural. Masyarakat Kampung HBB menerima berbagai agama dan etnis dengan upaya menata keragaman dalam membina kerukunannya.

Pada tataran pola masyarakat multikulturalisme, maka masyarakat Kampung HBB dapat dikategorikan sebagai masyarakat multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat majemuk di mana kelompok-kelompok budaya utama berupaya membentuk hubungan yang setara dengan kultur dominan dan menghendaki kehidupan dalam kerangka nilai yang dapat diterima para pihak secara kolektif. Terdapat tiga penyebab yang mendorong terwujud kerukunan masyarakat yaitu adanya persatuan dari pelbagai pemeluk agama dan suku yang diperlihatkan dalam bentuk toleransi, adanya keseimbangan hubungan antara para tokoh masyarakat baik dari tokoh agama maupun tokoh etnik, dan terwujudnya kesetaraan dalam kehidupan masyarakat.

#### **4.2. Hutan Lindung Bur Telege dan Masyarakat Hakim Bale Bujang**

Menurut Nasruddin et al. (2020), hutan lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, pengendalian

erosi, pencegahan intrusi air laut, dan mempertahankan kesuburan tanah. Bur Telege merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang saat ini menjadi objek wisata baru di Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Melalui puncak bukit Bur Telege pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan Kota Takengon dan Lut Tawar. Berdasarkan rekaman sejarah yang diceritakan oleh Kepala Desa (Reje) dan aparatur kampung Hakim Bale Bujang, Bur Telege sendiri memiliki makna bukit/puncak (*bur*) sumur/telaga (*telege*). Sebelum dipopularkan dengan nama asalnya “Bur Telege” sebagian masyarakat mengenalnya Bur Gayo dan bukit ini telah dijuluki dengan bahasa asing (Inggris) “***Gayo High Land***”. Kami perlu mengembalikan kembali kepada asalnya sesuai sejarah agar kami dan generasi dapat memahami dan memanfaatkannya sesuai dengan filosofi dan kearifan masyarakat terdahulu, hutan adalah “perut” – sumber kehidupan masyarakat sekitar dan Gayo secara keseluruhannya. Dengan demikian, pemanfaatannya juga merujuk kepada titah dan konsep pengetahuan “*Empu Nie Tempat*” (Wawancara Misriadi, 2022).



Gambar 4. Area Bur Telege

Bagi masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang Bur Telege merupakan hutan adat yang diwarisi oleh nenek moyang orang Gayo, namun secara legal formal hutan tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang diberikan izin untuk penjagaan melalui kerjasama walaupun belum ada status izin mutlak dari pemerintah. Hanya saja hutan lindung ini boleh dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan kesepakatan antara KPH Bener Meriah dengan Pemerintah Kampung Hakim Bale Bujang yang bertanggung jawab kepada KPH (Ambia, 2022). Menurut (Edi Azhari, 2022) Kerjasama tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat secara bersama-sama memperoleh manfaat dari kawasan hutan Bur Telege dalam jangka waktu 10 tahun, baik manfaat ekonomi maupun manfaat lingkungan. Pengelolaan hutan lindung Bur Telege dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kampung Hakim Bale Bujang sebagai

wacana penjagaan dan sumber ekonomi warga setempat melalui ekowisata.

Ide awal mengapa Bur Telege menjadi kawasan ekowisata sangatlah sederhana yaitu dimana penduduk Kampung Hakim Bale Bujang sering melihat muda-mudi berpergian ke atas bukit untuk berswafoto dan duduk santai, namun disisi lain kawasan hutan ini adalah hutan adat yang sudah dirawat secara turun-temurun. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti khalwat dan pelanggaran syariat Islam maka dari itulah tempat ini di sunglap menjadi kawasan pariwisata dan ladang mencari nafkah bagi pendudukan sekitar.

Bur Telege sendiri merupakan kawasan hutan adat yang dulunya hanya dijadikan masyarakat sebagai lokasi untuk mengambil kayu bakar. Namun selain itu masyarakat mempercayai bahwa kawasan hutan Bur Telege menyimpan banyak manfaat dari apa yang ada didalamnya, salah satunya adalah Bur Telege menyimpan mata air sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Kota Takengon dan sekitarnya. Bur Telege adalah salah satu sumber air untuk Lut Tawar, Lahan Pertanian sekitar, sumber air bersih warga dan kelestariannya juga merupakan sumber mitigasi bencana ekologi alamiah berupa banjir dan longsor.

Menyadari urgensi dan signifikansi Bur Telege bagi kehidupannya, masyarakat Bale Hakim Bale Bujang menempatkan Bur Telege sebagai prioritas utama yang harus mereka jaga kelestariannya dalam kehidupan mereka. Wacana penjagaan kelestarian hutan Lindung Bur Telega gencar dilakukan setelah dilakukannya telaah naskah kerjasama oleh aparaturnya Kampung Hakim Bale Bujang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa selain Bur Telege dijadikan sebagai kawasan ekonomi wisata, esensinya

adalah mengedukasikan kepada masyarakat bahwa Bur Telege adalah milik komunal masyarakat Gayo sebagai sumber kehidupan bersama.

Semua itu dirangkum sebagai basis referensi nilai dalam membangun masyarakat Gayo yang tidak terlepas dari kearifan lokal yang bersandar pada ketentuan hukum Islam dan adat-istidat/budaya masyarakat Gayo, seperti; Genap mupakat "*syuro*" (musyawarah), *amanat* (amanah), *tertib, alang tulung beret bantu* (saling-tolong menolong", *gemasih* (kasih sayang), *setie* (setia), *bersikekemelen* (berkompetisi), dan *mutentu* (berdayaguna) (Wawancara Aman Dio, 2022).

#### **4.2.1. Bur Telege dalam Pandangan Dunia Masyarakat Hakim Bale Bujang**

Paradigma ekonomi dunia yang bergeser dari paradigma ekonomi konvensional yang berbasis pada eksploitasi alam ke paradigma ekonomi hijau (*green economy*) telah berhasil memberi harapan tidak hanya pada kesejahteraan ekonomi masyarakat berkelanjutan tetapi juga pada kelestarian lingkungan berkelanjutan (Loiseau et al., 2016). Melalui ekonomi hijau masyarakat lokal tidak terpinggirkan dari aktivitas perkembangan ekonomi sebagaimana realitas empiris perkembangan ekonomi konvensional yang cenderung menempatkan masyarakat lokal sebagai penonton dari deru kencang aktivitas ekonomi. Pada paradigma ekonomi hijau masyarakat justru menjadi pelaku utama ekonomi sehingga mereka terdorong untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraannya dengan menjaga kelestarian lingkungan sebagai sumber ekonomi mereka (Ivlev & Ivleva, 2018).

Salah satu sumberdaya ekonomi hijau berbasis kehutanan yang berhasil menciptakan ekonomi berkelanjutan dan terjaganya kelestarian



hutan adalah pariwisata hutan lindung Bur Telege di Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh. Dalam kesatuan dunia sebagai sebuah keteraturan dan ketersusunan yang baik, secara implisit terungkap dalam pandangan dunia masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang yang khas adalah bahwa realitas Bur Telege dulunya dikenal dengan Bur Pereben. Gunung yang menjadi pusat air minum masyarakat Kota Takengon. Menurut Aman Gayo (2022) masyarakat Gayo menganggap hutan sebagai “perut”. Artinya, hutan menjadi penopang hidup masyarakat Gayo. Banyak kebutuhan dapur Orang Gayo bersumber dari hutan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa ada 87 jenis sambal (*cecah*) asli gayo banyak menggunakan bahan baku rempahnya yang berasal dari hutan alam gayo sendiri. Misalnya, andaliman, gegarang, pisang keken, dan lain-lain. Semua jenis bahan baku tersebut mudah didapatkan di wilayah-wilayah hutan yang tidak dijamah langsung oleh manusia, salah satunya adalah hutan Bur Telege.

Menurut (Bagus, 2005), *Worldview* merupakan *term* bahasa Inggris, semakna dengan bahasa Jerman, yakni *weltanschauung*. Berarti “pandangan hidup” atau “pandangan dunia”. Kedua istilah tersebut berhubungan dengan pandangan tentang *kosmos* atau realitas sebagai suatu keseluruhan. Dalam perspektif umum, pandangan tentang dunia ini bermakna pandangan mengenai hakikat, nilai, makna, tujuan dunia serta eksistensi hidup manusia. Selain itu, dapat dipahami pula, bahwa *worldview* adalah sistem prinsip, perspektif, dan keyakinan yang dapat menentukan arah aktifitas seseorang, kelompok sosial, kelas, atau masyarakat. *Worldview* substansinya lebih dari sekedar gambaran sebagai sinopsis dan perluasan konseptual dari ilmu-ilmu alam ke dalam perspektif ilmiah terhadap dunia.

Pandangan dunia (*worldview*) merupakan pengetahuan dasar yang menjadi basis ukuran dalam menilai dan membimbing tindakan apa dan seperti apa sesuatu diperlakukan. Sebagai sumber referensi, tindakan sosial selalu meniscayakan bagaimana arahan dari pandangan dunia yang dianut baik bagi individu maupun kelompok. Selama pandangan dunia tidak berubah, maka tindakan individu dan kelompok selalu seperti apa kata pandangan dunianya. Pada masyarakat, pandangan dunia ini terbungkus dalam kearifan lokal mereka. Kearifan lokal adalah katup pandora yang mewadahi semua referensi tindakan sosial masyarakat.

Kearifan lokal masyarakat adat tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang manusia dan bagaimana relasi harmonis antar sesama manusia, namun juga terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan mengenai manusia dan hubungan dengan ekologinya. Seluruh kearifan lokal tersebut dihayati, dipraktikkan, ditransformasikan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Seperti halnya yang dipraktikkan oleh masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang. Mereka memiliki kesadaran subjektif untuk melestarikan Bur Telege sebagai hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya secara berkelanjutan lintas generasi.

*Worldview* masyarakat Hakim Bale Bujang dalam khasanah kearifan lokal wisata Bur Telege bahwa menjaga hutan bukan hanya sebatas ketersediaan sumber mata air bagi masyarakat Hakim bale bujang, melainkan masyarakat menyadari dengan menjaga hutan Bur Telege menjauhkan mereka dari bencana Alam, baik longsor maupun banjir bandang. Ada pepatah gayo yang sering terucap “*mungenali hutan sigere bertene, mungenali belang sigere berpancang*” “mencari hutan yang tidak bertanda, mencari lapangan yang tidak bertiang” dimana

ungkapan ditunjukkan untuk pemuda yang ingin melamar seorang gadis Desa dengan tetap memberikan pengetahuan tentang pengelolaan Hutan. Membangun tempat wisata Bur Telege salah satu cara masyarakat menjaga hutan. Dengan adanya tempat wisata Bur Telege tersebut, masyarakat bisa mengontrol setiap aktivitas disekitaran hutan dari penebangan hutan dan penangkapan satwa liar yang ada di hutan.

Orang Gayo percaya bahwa setiap hutan, apalagi hutan lindung ada penjaganya, mereka menyebut dengan "Empu Nie Tempat". Empu Nie Tempat adalah makhluk halus yang menjaga kelestarian hutan. Dalam kepercayaan orang Gayo, Empu Nie Tempat telah membagi hutan kedalam hutan yang dapat di garap dan hutan yang tidak boleh digarap atau dirubah bentuknya. Empu Nie Tempat memberi tanda hutan tersebut dengan realitas petani yang menggarap hutan yang boleh di tanami tanaman pertanian dengan hasil yang melimpah dan memberi tanda pada hutan yang tidak boleh ditanami dengan pelbagai kemalangan yang menimpa pelaku seperti Kerasukan, Sakit, Gagal Panen dan pelbagai musibah alam seperti banjir dan longsor.

Kepercayaan yang bersifat mitologis ini, dalam perspektif ilmiah dianggap sebagai irasional. Hal ini tidak terbantahkan. Namun, meskipun secara empiris kepercayaan ini tidak nyata tetapi praktik dari kepercayaan ini nyata. Mitos sebagai bagian dari tradisi lisan, yang mengandung kearifan lokal, yang berisi berbagai ajaran kebajikan dan keharmonian. Daeng & Hans (2000:103) menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional mitos berperan sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang berjalan, baik karena diyakini memperoleh campur tangan leluhur. Sebagai contoh adalah mitos Dewi Sri di Jawa dan Bali

yang diyakini memiliki makna penting dalam pelestarian sawah, karena Dewi Sri merupakan Dewi Kesuburan (Dewi, 2009:1).

Sedangkan Wouden (1985) mengidentikkan mitos dengan cerita yang bernuansa kosmis, yaitu cerita rakyat yang hidup di dalam masyarakat tradisional. Selanjutnya Hasanuddin, (2010:3), mengidentifikasikan mitos sebagai satu unsur tradisi yang dapat dijadikan sebagai sistem komunikasi yang memberikan pesan berkenaan dengan aturan masa lalu, ide, ingatan kenangan, atau keputusan yang diyakini. Selain itu, menurutnya mitos juga selalu berhubungan dengan keyakinan, dan keyakinan berhubungan dengan kepercayaan.

Kepercayaan masyarakat Gayo terhadap Empu Nie Tempat (penunggu tempat), menjadi instrument penting dalam melahirkan keserasian hubungan masyarakat dengan lingkungan hidup khususnya lingkungan alam seperti hutan. Masyarakat Gayo percaya empu nie tempat memberi tanda dan restu terhadap hutan yang dapat di garap dan hutan yang dilarang untuk digarap. Apapun yang ditetapkan oleh empu nie tempat dipercaya sebagai suatu keputusan untuk kebaikan masyarakat. Empu nie tempat memberi tanda hutan yang direstui untuk digarap dengan tanda penggarapnya memperoleh hasil panen yang melimpah sehingga penggarapnya hidup sejahtera.

Sebaliknya, hutan yang dilarang untuk digarap empu nie tempat memberi tanda pelakunya kerasukan, sakit, gagal panen dan bencana alam. Berdasarkan “tanda” dari empu nie tempat itu masyarakat Gayo kemudian membagi hutan dalam dua kategori yaitu hutan garapan dan hutan larangan. Hutan garapan digunakan untuk pelbagai aktivitas pertanian dan hutan larangan menjadi hutan lindung.

Empu Nie tempat ini bagi orang Gayo merupakan suatu sistem nilai dan komunikasi yang efektif dalam mengkonsolidasi masyarakat terutama pada tata pikir dan tata perilaku dalam memperlakukan alam. Melalui mitologi ini relasi harmonisasi masyarakat Gayo dan alam terjalin dan tertata, sehingga pemanfaatan alam dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Relasi dialektis ini menghasilkan kemanfaatan ganda, bagi masyarakat keterpenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sementara bagi alam tetap terjaga, terawat dan terlindungi dari eksploitasi.

#### **4.2.2. Bur Telege dan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Hakim Bale Bujang**

Bertani merupakan mata pencaharian utama masyarakat dataran tinggi Gayo, terutama pada masyarakat ekonomi kelas menengah, tidak terkecuali pada masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang yang berada di wilayah perkotaan. Bertani telah dilakukan sejak era pra-aksara hingga dengan saat ini. Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat Gayo. Pertanian utamanya adalah tembakau, kopi dan palawija. Pada masa lalu, pola pertanian dilakukan secara berpindah-pindah (*nomaden*) yang disebut berladang, lalu berubah menjadi semi menetap dan menetap. Masa itu merupakan periode yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia yang semula sebagai pengumpul makanan (*Food Gathering*) berubah saat ini menjadi penghasil makanan (*Food Producing*). Sejalan dengan berkembangnya zaman, mata pencaharian bukan hanya bercocok tanam sebagai sumber ekonomi, namun juga berpikir akan pengetahuan baru tentang bagaimana memanfaatkan kawasan melalui ekowisata sebagai sumber ekonomi lainnya.

Menurut Amanda & Yoesoef (2017), mata pencaharian masyarakat Gayo sebagai petani kopi dimulai sejak era kolonial Belanda (1904-1942). Pada tataran geografis, dataran Tinggi Gayo sesuai dijadikan sebagai kawasan perkebunan kopi. Secara historis, tanaman kopi untuk pertama kalinya dikembangkan di Dataran Tinggi Gayo pada tahun 1908, pencetusnya adalah seorang Belanda yang bernama Veenhuysen. Awalnya, tanaman kopi tersebut merupakan tanaman non komersial sehingga ditanam secara terbatas. Seiring dengan perubahan permintaan pasar, pada tahun 1918 dengan dibukanya perkebunan kopi Wilhelmina Blang Gele, tanaman kopi menjadi tanaman komersial baik yang dikelola oleh Belanda maupun pengusaha pribumi. Pada masa itu buruh tani yang diperkerjakan pada perkebunan milik pengusaha Belanda maupun pengusaha pribumi didatangkan dari pulau Jawa. Mereka dikenal dengan sebutan “Jawa Kontrak” atau “Jawa Kolonialisasi”.

Kehadiran pelbagai objek wisata di kawasan Aceh Tengah secara signifikan mendorong tumbuhnya pelbagai mata pencaharian baru bagi masyarakat Gayo. Diversifikasi pekerjaan ini mendorong terjadinya perubahan signifikan pula pada kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa objek wisata unggulan lainnya yang berdekatan dengan Bur Telege sebagai sumber ekonomi alternatif masyarakat Takengon adalah; Danau Lut Tawar, danau ini merupakan ikon kota Takengon yang berada di tengah-tengah kota, Pantan Terong (wisata pemandangan) yang terletak di bukit Kota Takengon, Taman Buru Linge Isak (wisata berburu) yang menjadi tempat berburu masyarakat Gayo, Gua Loyang Koro, destinasi wisata yang menceritakan tentang legenda sejarah pada masyarakat Gayo, Loyang Pukes yang terletak di pinggir Danau

Laut Tawar yang memiliki sejarah bagi masyarakat Gayo, Loyang Datu (Gua) yang bersebelahan dengan Loyang Koro, Burni Klieten (*hiking*) merupakan gunung yang dijadikan sebagai arena pendakian, Gayo Waterpark (wahana wisata keluarga), dan Krueng Peusangan Arum Jeram adalah tempat wisata yang dapat dinikmati oleh pencinta arungan air dan keluarga.

Dari berbagai objek wisata tersebut, tak terbantahkan yang paling terkenal saat ini adalah adalah Ekowisata Bur Telege yang berada di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Laut Tawar. Ketinggiannya mencapai 1.250 meter di atas permukaan laut, sehingga Pesona Kota Takengon dan Danau Lut Tawar dapat dinikmati langsung oleh wisatawan dari atas ketinggian tersebut. Padahal, mulanya bukit hutan ini oleh masyarakat sekitar dijuluki tempat “jin buang anak” (sepi dari keramaian masyarakat), kecuali dimanfaatkan oleh sebagian anak muda-mudi sebagai tempat mesum untuk melakukan maksiat. Destinasi wisata ini sangat dekat pusat Ibukota Aceh Tengah, Takengon. Pengunjung ketika berada di seputaran pun dapat mengidentifikasinya melalui satu tulisan besar di atas bukit, "*Gayo Highland*", itulah lokasi Ekowisata Bur Telege (Wawancara Fauzuluddinm 2022).

Bur Telege memiliki nilai dan keuntungan yang signifikan bagi kemajuan ekonomi masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang, karena itu sektor pariwisata ini digolongkan sebagai industri baru bagi masyarakat setempat dan merupakan sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, dan penyedia lapangan pekerjaan yang banyak. Sumber ekonomi dan lapangan pekerjaan ini dapat dilihat dari sektor jasa, layanan wisata, dan berbagai usaha kecil. Berdasarkan laporan dari dari Ketua BUMK Hakim Bale Bujang. Secara keseluruhan jumlah

pendapatan BUMK dari wisata Bur Telege per bulan saat ini berjumlah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) atau per tahun memiliki pendapatan kotor sebesar RP. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) lebih (Wawancara Fauzuluddin, 2022).

Menurut Zhang (2012) sebagaimana dikutip dalam (Sesotyaningtyas & Manaf, 2015) menyatakan bahwa pengembangan desa wisata mampu memberikan banyak manfaat, termasuk (1) meningkatkan ekonomi kolektif pedesaan, (2) mempercantik tampilan pedesaan, (3) memperkuat konstruksi peradaban pedesaan, (4) meningkatkan pendapatan masyarakat, (5) mengubah kegiatan mata pencaharian tradisional dan gaya hidup masyarakat, dan (6) mengurangi kesenjangan perkotaan-pedesaan dan membangun masyarakat yang harmonis. Tentu saja, pembentukan pariwisata desa harus menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki rumah dan lingkungan mereka.

Potensi alam di kawasan Bur Telege menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat lokal untuk dikembangkannya secara bersama-sama. Pengembangan kawasan Bur Telege dapat menjadi segmen kegiatan wisata yang memanfaatkan secara berkelanjutan warisan alam dan budaya, religi, untuk mendorong pelestariannya, dan berupaya membentuk kesadaran lingkungan melalui interpretasi lingkungan dengan mempromosikan kesejahteraan masyarakat yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua BUMK HBB, Investasi awal untuk pengembangan wisata Bur Telege dengan dianggarkannya Dana Desa Rp. 243.000.000 untuk membangun fasilitas. Saat ini terdapat sejumlah fasilitas wisata tambahan. Selain MCK, Pos masuk, kedai kopi, juga ada vila penginapan, panggung kesenian, jalan setapak, *flying fox*, kedai souvenir, dan berbagai lokasi swafoto. Selain itu, di lokasi objek wisata



Bur Telege telah banyak dibangun spot yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat berswafoto dan *instagramable*.

Bur Telege disatu sisi penting sebagai sumber daya ekonomi masyarakat namun disisi yang lain juga dianggap berguna bagi sumber penghidupan masyarakat Hakim Bale Bujang, karena selain sebagai sumber ekonomi masyarakat yang berusaha sebagai pedagang dan petugas keamanan, namun dari segi perlindungan hutan kegiatan wisata disana tidak terganggu karena dipahami sebagai sumber kehidupan mata air dan ekosistem yang jika dirusak berdampak pada bencana longsor dan kerusakan hutan lainnya. Sehingga ada akumulasi nilai ekonomis dan sistem sosial yang berjalan dalam proses pengelolaan Bur Telege. Secara sumber daya ekonomi saat ini ada 6 orang anak muda yang bekerja sebagai keamanan, 3 orang Penjaga Villa dan 15 orang pedagang yang setiap harinya menggantungkan harapan dari wisata Bur Telege (Wawancara Albar, 2022).

#### **4.2.3. Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Modal Sosial dan Kelestarian Hutan Bur Telege**

Bur Telege merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Bur Telegemenurut pengetahuan masyarakat sekitar dulunya merupakan hutan adat yang tersebar diwilayah Kampung Bale Bujang, Kampung Asir-Asir, Kampung Bujang dan Kampung One-one dengan luas 8000 Ha. Hutan ini merupakan hutan lindung yang telah memiliki Hak Izin dari UPT. KPH Bener Meriah untuk dikelola sebagai kawasan wisata Bur Telege milik bersama (komunal) masyarakat yang berada pada fungsi kawasan areal penggunaan lain (APL). Hutan lindung ini diklaim sebagai hutan adat oleh masyarakat

yang masuk dalam wilayah administrasi Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (Wawancara Edi Azhari, 2022).

Menurut Ali (2018) dalam tradisi masyarakat adat Gayo, kawasan hutan di bagi atas beberapa bagian di antaranya *blang penjemuren* (tempat menjemur padi), *blang perutemen* (tempat mengambil kayu bakar), *blang perueren* (tempat memelihara hewan ternak), *blang perempusen* (tempat untuk berkebun), dan *Aih Aunen* (tempat kawasan sungai sebagai sumber air).

Hutan adat Bur Telege memiliki keanekaragaman flora dan fauna, diantaranya berbagai macam jenis pohon penghasil kayu dan getah yang awalnya dimanfaatkan oleh masyarakat adat sekitar hutan. Selain itu berdasarkan hasil pengamatan saat ini tercatat ada 91 Spesies burung di kawasan Desa Hakim Bale Bujang. Dari jumlah tersebut diantaranya 14 Burung endemik Sumatera dan bersatus dilindungi. Keberadaan burung endemik Sumatera seperti *Scheinder Pitta's*, *Lesser shortwing*, *Pigeon*, *Sumatran Bulbul* atau *Brinji Gunung Sumatera*, *Sumatran Flowerpecker* atau *Cabai Perut Kuning Sumatera*, *Sumatran Frogmouth* atau *Paruh Kodok Kepala Pucat*, *Sumatran Green Pigeon* atau *Punai Burung Sumatera*, dan lainnya dapat ditemui di *Bur Mulo Forest Park*. Bukan hanya itu, hewan primata seperti *Thomas Leaf Monkey* atau *Lutung Kedih* dan *Red Giant Flying Squirrel* atau tupai terbang juga ada di sini. Terdapat pula anggrek lokal yaitu *Paphiopedilum bungebelangi Metusala section Barbata* yang baru ditemukan sekitar tahun 2017. Kawasan *Bur Mulo Forest Park* yang merupakan pegunungan, membuat flora dan fauna tumbuh dan berkembang biak dengan baik (Wawancara Abrar, 2022).

Namun demikian, kekayaan flora dan fauna di Bur Telege tidak membuat masyarakat bertindak sesuatu yang merusak alam akan tetapi tetap juga menjaga kelestarian melalui kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat. Hal tersebut tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang bawah Bur Telege menjadi sumber penghidupan akan kebutuhan air bagi masyarakat, untuk itu Bur Telege dipadang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat terhadap keberlangsungan antara penghidupan dan pengelolaan hutan lindung dengan kearifan lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat diantaranya yaitu melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan keberadaan hutan, sehingga kearifan lokal yang bernilai positif pada masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian Bur Telege.

Tabel. 4.1. Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Hakim Bale Bujang

No.	Bentuk Kearifan Lokal	Keterangan
1	Larangan pencemaran dan/atau perusakan hutan.	Kepercayaan terhadap mitos ini menyebabkan masyarakat sangat takut untuk berperilaku yang dapat merusak kelestarian hutan adat karena masih percaya terhadap mitos

2	Larangan berburu, menembak, menjaring, memikat dan menangkap segala jenis burung, ayam hutan dan satwa lainnya di wilayah hutan adat.	Larangan ini menyebabkan masyarakat takut untuk mengambil atau membunuh hewan-hewan yang langka yang hingga saat ini tetap ada didalam hutan Bur Telege.
3	Larangan melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup sebelum mendapatkan izin lingkungan dari instansi yang berwenang;	Larangan ini menyebabkan masyarakat takut merusak dan pencemaran lingkungan karena akan melanggar norma adat.
4	Larangan menebang dan/atau merusak tumbuhan di sekitar mata air kampung.	Larangan ini menyebabkan tidak ada masyarakat yang berani menebang pohon didalam Hutan Bur Telege
5	Larangan memperjual belikan air dari mata air kampung.	Larangan ini menyebabkan masyarakat takut memperjualbelikan mata air karena akan melanggar norma adat.
6	Larangan membuka lahan baru dalam kawasan hutan adat (hutan lindung) tanpa izin.	Larangan ini menyebabkan masyarakat takut membuka hutan untuk berladang karena akan melanggar norma adat.

7	Larangan mengebiri pohon (Gasi).	Larangan ini menyebabkan masyarakat takut mengebiri pohon karena akan melanggar norma adat.
8	Larangan membangun gedung, rumah, pemukiman dan bangunan lainnya tanpa izin petua adat dan Reje Kampung.	Larangan ini menyebabkan masyarakat takut mendirikan bangunan sembarangan karena akan melanggar norma adat.

Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2022

Dalam masyarakat Gayo sendiri ada kepercayaan tentang “*empu ni tempat*” atau penguasa di hutan. Dimana Sebelum menebang kayu yang ada di hutan ada tatacara khusus untuk meminta izin kepada “*empu ni tempat*”, biasa cara pengambilan kayu di hutan ini di pimpin oleh pawang hutan. Kayu yang telah ditebang harus ditanami kembali sesuai jumlah kayu yang diambil dari hutan. Menurut kepercayaan masyarakat Gayo bila ada masyarakat dengan sembarangan menebang kayu yang ada di hutan bisa mendapat kesialan sakit dan kutukan dari “*empu ni tempat*” seperti tampar ni jin (di tampar penghuni mahluk halus di hutan). Sementara itu diarea Bur Telege juga terdapat makam para leluhur dan Tugu Putri Bunsu yang diresmikan oleh Ali Hasyimi pada 24 Juli 1960. (Wawancara Joni, 2022).



Gambar. 4. Tugu Putri Bunsu

Menurut Joni (2022) selain itu juga di atur agar tidak sembarangan menebang kayu di hutan. Salah satu pepatah Gayo *“tebang pilih kayu l uten kati selisih mara bahaya”* (menebang di hutan harus pilih-pilih, tidak boleh sembarangan agar bahaya bencana alam tidak terjadi). Ada juga pepatah Gayo berisi *“mugenal uten sigere bertene, mugenal belang sigere mu pancang”* (mencari hutan yang tidak di tandai, mencari ladang yang bertiang), artinya mencari lahan untuk perkebunan haruslah dengan mengetahui lokasi hutan yang tidak boleh di tebang dangan hutan yang boleh di jadikan ladang pertanian.

Masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang menganut dualisme pengelolaan pemerintahan dengan dua pemimpin yang memiliki tugas dan fungsi berlainan, yaitu pengelolaan secara adat yang dipimpin oleh

“*petue*”, dan pengelolaan secara formal diselesaikan oleh “*reje*”. Dalam sistem pemerintahan saat ini dikenal dengan “*sara opat*” istilah ini merupakan pemimpin adat dan bertugas memimpin kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintahan formal yang ada dalam masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang adalah kepala desa (*Reje*). Kepala pemerintahan diangkat sesuai prosedur peraturan pemerintah (Wawancara Misriadi, 2022).

Dualisme kepemimpinan yang ada dalam masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang tidak lantas memunculkan konflik peran, karena adanya sikap saling pengertian tentang tugas dan wewenangnya. Peran *Petue* di masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang sebagai penjaga tradisi masih dijaga hingga saat ini. Bahkan termasuk untuk menjaga kawasan *Bur Telege* sebagai wilayah ekosistem yang harus dijaga sesuai konsepsi tanah adat oleh para leluhur sebelumnya.

Sementara tindakan formal dilakukan oleh *reje* Kampung Hakim Bale Bujang dengan melahirkan Qanun Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 27 April 2019 yang ditanda tangani oleh *reje* dan Rakyat Genap Mufakat (RGM) Kampung HBB. Dengan tujuan untuk menyelamatkan *Bur Telege* sebagai hutan adat melalui keberlangsungan kearifan lokal. Berdasarkan Qanun yang berisi tentang 14 larangan yang jika dilanggar akan diproses secara adat dan dikenakan sanksi denda oleh aparat Kampung Hakim Bale Bujang.

Kampung Hakim Bale Bujang salah satu Kampung yang memiliki Qanun Pelestarian Lingkungan Hidup. Qanun tersebut diterbitkan untuk melindungi wilayah Kampung Hakim Bale Bujang dari kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, menjaga kelestarian ekosistem, kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga hak generasi kini dan generasi masa

depan terhadap lingkungan hidup. Hal lain bahwa, Peran regulasi dan pemerintah tidak ada sehingga qanun inilah sebagai alternatifnya melalui muatan Qanun yang dibuat dengan azas nilai-nilai adat. Qanun tersebut juga sebagai alternatif bahwa banyak proses hukum melalui hukum formal secara administrasi menghabiskan waktu 2 minggu. Apalagi kalangan pengusaha yang terlibat. Selama ini banyak kepentingan dalam putusan yang dianulir dari dalam. Masuk orang luar yang punya kepentingan orientasi pada ekonomi saja (Wawancara Misriadi, 2022).

Selama ini ada pengawas adat atau *Pengulu hutan*, mengawasi hutan, hutan yang boleh di tebang dan hutan yang boleh di jadikan kebun harus meminta pendapat atau ijin terlebih dahulu dari *Pengulu hutan*. Hutan yang kemiringan 40 derajat tidak boleh sama sekali di tebang atau di jadikan kebun. Dulu cara *Pengulu hutan* untuk mengukur kemiringan dengan megelindingkan batu. Jika batu megelinding dengan kencang ke bawah bagian kayu di wilayah tersebut tidak boleh sama sekali di tebang (Wawancara Joni, 2022).

#### **4.2.4. Praktik Masyarakat Bur Telege dalam Pemanfaatan Kearifan Lokal dan Modal Sosial untuk Pengembangan Ekowisata yang Berkelanjutan**

Kawasan hutan Bur Telege pada masyarakat Hakim Bale Bujang merupakan daerah hutan wisata yang paling dilindungi oleh masyarakat HBB. Hal tersebut tidak terlepas dari sistem kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat Hakim Bale Bujang. Inti dari kearifan lokal tersebut ditunjukkan dengan ketentuan adat yang mutlak yang disebut juga sebagai pantang larang yang berlaku bagi siapapun yang memasuki kawasan Bur Telege.



Menurut Pinan & Hakim (1998:8) adat istiadat sebagai salah satu unsur kebudayaan masyarakat Gayo, menganut prinsip *Keramat Mupakat, Behu Berdedele* artinya Kemuliaan karena Mufakat, Berani Karena Bersama. *Tirus lagu gelas belut lagu umut rempak lagu re susun lagu belo* artinya persatuan dan kesatuan. *Nyawa sara pelok ratep sara anguk* artinya tekad untuk melahirkan kesatuan sikap dan perbuatan serta banyak lagi falsafah pelambang yang mengandung nilai kebersamaan dan kekeluargaan serta keterpaduan.

Masyarakat adat memiliki suatu kekuasaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal kekuasaan masyarakat yang berwujud itulah yang disebut sebagai hak ulayat. Secara terminologi, BZN (2017) menyatakan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan dan kekayaan sendiri baik berupa benda terlihat maupun tidak terlihat. Pengertian Hak ulayat atau tanah adat itu sendiri adalah serangkaian kewenangan masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan tanah yang ada di dalam wilayah atau lingkungannya. Kewenangan yang dimaksud di sini adalah menata atau mengelola dan menentukan peruntukan penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya agraria dalam wilayah hak ulayat tersebut.

Praktik komunalitas masyarakat Hakim Bale Bujang dalam menjaga Bur Telege, berdampak positif dengan hadirnya kontrak kerjasama antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan Kampung Bale Bujang terkait tindak lanjut dari perlindungan dan pengawasan masyarakat terkait hutan lindung Bur Telege. Kerjasama ini tertuang dalam kontrak kerjasama selama 10 tahun. Kerjasama ini selain sebagai dampak kesejahteraan ekonomi dari pengelolaan wisata juga sebagai bentuk pengawasan hutan dari masyarakat terhadap kerusakan hutan lindung.

Penerbitan kontrak kerjasama hak komunal dalam konteks pengawasan hutan lindung merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan Pemerintah Kampung Hakim Bale Bujang untuk melakukan kegiatan yang legal tanpa menimbulkan permasalahan (Wawancara Ambia, 2022).\

Menurut Ambia (2022) Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (kemenLHK) No. 83 Tahun 2016 telah menerbitkan kebijakan Perhutanan Sosial yang merupakan harapan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan Kebijakan tersebut Pemerintah telah membuka pintu kepada masyarakat sekitar hutan mengakses lahan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sembari untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan. Masyarakat dapat mengakses lahan hutan melalui beberapa skema yakni Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) serta Kemitraan Kehutanan.

Dinamika kehidupan manusia mengharuskan terjadinya pola interaksi dan adaptasi dengan lingkungan alam sekitar. Mereka hidup di bumi bersama makhluk hidup lain terkait erat dalam hubungan yang berlangsung harmonis. Manusia berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan alam sekitarnya, namun pada level tertentu mereka melakukan eksploitasi berlebihan terhadap alam yang menyebabkan kerusakan alam. Hubungan harmonis tersebut pada akhirnya terganggu dengan adanya tindakan-tindakan manusia merusak lingkungan demi kepentingannya sendiri.

Upaya Pewarisan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal merupakan salah satu bagian penting dalam menumbuhkan dan membangun jati diri. Menurut Koentjaraningrat (1993) budaya adalah suatu cara hidup

yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan hidup yang berbeda di setiap daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Fauzuluddin (2022), penanaman nilai-nilai kearifan lokal terkait pemanfaatan Bur Telege setidaknya dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, Ide awal konsep pengelolaan wisata Bur Telege muncul pada tahun 2016, sebagai kekhawatiran dari aparaturnya Kampung Hakim Bale Bujang bahwa para muda-mudi yang berkumpul disana akan melakukan tindakan-tindakan khalwat atau mesum yang dapat menodai dan melanggar keberlangsungan Syariat Islam di Aceh Tengah. Kedua, muncul kegelisahan lain bahwa Bur Telege sebagai sumber kehidupan mata air bagi masyarakat Kota Takengon, jika tidak dirawat dan dilestarikan akan mengalami bencana yang besar, selain juga terkait satwa dan hewan yang perlu dilindungi karena memiliki jumlah yang terbatas.

Pewarisan nilai-nilai historis dan kearifan lokal mengarah pada satu tujuan yakni adanya upaya penanaman nilai dan norma yang bermuara pada kesadaran sejarah di kalangan masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang. Untuk mencapai hasil tersebut maka diperlukan kesinambungan antara pendidikan formal dan informal karena dalam kesehariannya masyarakat hidup dalam dua kemungkinan tersebut, dalam hal ini ada yang memahami Bur Telege hanya sebatas sumber ekonomi untuk keuntungannya saja, namun ada juga yang mengetahui bahwa Bur Telege memiliki hajat orang banyak. Sehingga Implementasi melalui model pewarisan nilai-nilai kearifan lokal berkaitan dengan kearifan ekologis merawat Bur Telege sebagai sumber penghidupan masyarakat

diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih bermakna bagi masyarakat.



# BAB V

---

## PENUTUP

---

Salah satu sumberdaya ekonomi hijau berbasis kehutanan yang berhasil menciptakan ekonomi berkelanjutan dan terjaganya kelestarian hutan adalah pariwisata hutan lindung Bur Telege di Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh. Masyarakat Hakim Bale Bujang yang mendiami kawasan hutan lindung Bur Telege merupakan penjaga kelestarian hutan lintas generasi dan kini melalui inovasi pengembangan pariwisata mereka menikmati kesejahteraan ekonomi berkelanjutan. Solidaritas dan kolektifitas masyarakat Gayo Hakim Bale Bujang dalam menjaga kelestarian hutan di didorong oleh pengetahuan dari kearifan lokal mereka yang disebut dengan “Peu Tempat” (Penjaga Tempat). Peu Tempat adalah makluk halus penunggu hutan yang senantiasa senang dan tidak mengganggu seseorang yang memanfaatkan hutan dengan

tidak merusaknya, sebaliknya ia marah kepada orang yang merusak hutan. Orang yang tidak diganggu oleh *Peu Tempat* dapat memanfaatkan hutan untuk kesejahteraannya dan sebaliknya orang yang membuat *Peu Tempat* marah akan memperoleh kemalangan. Kepercayaan ini mendorong orang Gayo menjaga hutannya tetap lestari lintas generasi. Namun, pewarisan kearifan lokal ini tidak berkesinambungan saat ini, terbukti pengetahuan ini masih kokoh dijadikan referensi tindakan kaum tua Gayo namun sudah melemah dikelompok tuanya.

Norma larangan merusak hutan, rasa saling percaya dan saling membantu serta jaringan komunalitas antar orang Gayo telah berhasil menjadi modal sosial penting bagi orang Gayo dalam spirit kolektifitasnya menjaga kelestarian hutan. Namun, modal sosial berupa jejaring eksternal masyarakat Hakim Bale Bujang dalam memudahkan perealisasi kepentingan mereka saat ini telah mengendur dan lemah. Pengembangan pariwisata hutan lindung Bur Telege tidak hanya “hidup” tetapi juga tumbuh yang ditandai dengan ramainya kunjungan wisatawan. Namun, perkembangan pariwisata ini mengalami stagnansi akibat dari lemahnya keterampilan pelayanan pada pengunjung, lemahnya kemampuan pemasaran dan infrastruktur. Maka, agar kelestarian hutan lindung Bur Telege berkelanjutan dan pariwisatanya berkemajuan perlu dilakukan serangkaian kebijakan intervensi melalui pelbagai program edukatif kepariwisataan baik dalam tata kelola pelayanan maupun tata kelola pemasarannya. Transformasi intensif kearifan lokal pengetahuan dan kepercayaan tentang “*Peu Tempat*” atau “*Empu Nie Tempat*” pada generasi muda baik melalui metode struktural maupun kultural. Membangu kerjasama dengan kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif dalam pengembangan pariwisata Bur Telege dan investasi baik investasi

dari pemerintah maupun pihak swasta terhadap pelbagai wahana atau infrastruktur kepariwisataan lainnya yang dapat menciptakan ketertarikan dan kenyamanan pengunjung.

“Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:”

- 1). Perkembangan Pariwisata Bur Telege telah berhasil tidak hanya dalam keterjagaan hutan lindung tetapi juga menjadi model ekonomi hijau bagi masyarakat dunia. Namun keterampilan pengelolaan pariwisata yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung Hakim Bale Bujang ini masih lemah, terutama keterampilan dalam hal melayani pengunjung (turis) dan pemasaran pariwisata. Pada aspek ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu melakukan serangkaian kebijakan intervensi melalui pelbagai program edukatif kepariwisataan baik dalam tata kelola pelayanan maupun tata kelola pemasarannya.
- 2). Kearifan lokal “*Peu Tempat*” yang merupakan suatu kearifan masyarakat Gayo yang terbukti efektif menjaga kelestarian hutan, saat ini hanya “hidup” dan menjadi landasan praktis bagi kaum tua sementara generasi muda Gayo umumnya terputus dengan pengetahuan ini. Jika kearifan lokal *Peu Tempat* punah, maka dorongan melestarikan hutan lindung seperti dalam kasus Bur Telege di desa Hakim Bale Bujang hanya semata didorong oleh motivasi keuntungan ekonomi, tatkala keuntungan ekonomi dari hutan lindung berkurang masyarakat bisa berbalik justru akan menjadikan hutan lindung sebagai “sumber” ekonomi



dengan cara menjarahnya. Agar kearifan lokal ini tidak punah dan mengancam kolektifitas orang Gayo dalam menjaga hutan khususnya hutan lindung maka perlu dilakukan transformasi intensif kearifan “Peu Tempat” ini pada generasi muda baik melalui metode struktural maupun kultural. Kearifan lokal menjadi modal sosial yang tumbuh dan berkembang jika digunakan secara kolektif dan akan punah kalau tidak dilembagakan secara Bersama. Oleh karena itu, pewarisan nilai kearifan lokal yang menjadi modal sosial masyarakat harus dilakukan melalui proses adaptasi, pembelajaran, serta pengalaman dalam praktik nyata.

- 3). Modal sosial berupa norma larangan merusak hutan, saling percaya terhadap sesama komunitas yang mendorong lahirnya solidaritas dan kerja kolektif berbasis repositas (saling membantu) masih sangat kuat dalam masyarakat Gayo terutama di desa Hakim Bale Bujang, namun jaringan sosial (*net working*) untuk memudahkan mereka dalam menjaga hutan dan mengembangkan pariwisata lemah. Perlu dilakukan intervensi penguatan *net working* masyarakat Hakim Bale Bujang terhadap para pihak yang berkepentingan (*stake holder*) dengan kelestarian hutan lindung dan jaringan pengembangan pariwisata baik lokal, nasional dan internasional. Kerjasama dengan kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif mendesak untuk difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Bur Telege.
- 4). Pariwisata Bur Telege telah mendapat perhatian massif dari pecinta keindahan alam di Aceh, namun jumlah pengunjung tidak mengalami pertambahan signifikan (stagnan). Kenyataan

ini dipicu oleh rendahnya infrastruktur yang dimiliki pariwisata Bur Telege. Ketertarikan pengunjung untuk berkunjung hanya diarahkan pada keindahan geografi dan panorama Bur Telege. Hal ini tidak berhasil menarik pengunjung lama untuk kembali dan calon pengunjung baru untuk datang. Pemerintah perlu melakukan intervensi melalui investasi baik investasi dari pemerintah maupun pihak swasta terhadap pelbagai wahana atau infrastruktur kepariwisataan lainnya yang dapat menciptakan ketertarikan dan kenyamanan pengunjung.



---

# DAFTAR PUSTAKA

---

- Adlin, N. W. (2022). Pengembangan Wisata Alam Bur Telege. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 3(1), 38–54.
- Afwan, B. A. (2015). *Mutiara Terpendam Papua: Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian di Tanah Papua*. Center for Religious & Cross Cultural Studies.
- Aguinis, H., & Solarino, A. M. (2019). Transparency and replicability in qualitative research: The case of interviews with elite informants. *Strategic Management Journal*, 40(8). <https://doi.org/10.1002/smj.3015>
- Akinyode, B. F., & Khan, T. H. (2018). Step by step approach for qualitative data analysis. *International Journal of Built Environment and Sustainability*, 5(3). <https://doi.org/10.11113/ijbes.v5.n3.267>
- Ali, U. (2018). *KEARIFAN TATA RUANG HUTAN DALAM ADAT GAYO \_ JKMA ACEH*. Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh.
- Amanda, A., & Yoesoef, A. (2017). PERKEMBANGAN ETNIS ACEH DI KOTA TAKENGON TAHUN 1950-2015. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2(2).

- Arianto, Z. (2019). *Upaya Pemerintahan Joko Widodo dalam Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia*.
- Bagus, L. (2005). Kamus Filsafat. In *Jakarta: Gramedia* (cet ke-4).
- Basnet, H. B. (2018). FOCUS GROUP DISCUSSION: A TOOL FOR QUALITATIVE INQUIRY. *Researcher: A Research Journal of Culture and Society*, 3(3). <https://doi.org/10.3126/researcher.v3i3.21553>
- Benson, M., & O'Reilly, K. (2022). Reflexive practice in live sociology: lessons from researching Brexit in the lives of British citizens living in the EU-27. *Qualitative Research*, 22(2). <https://doi.org/10.1177/1468794120977795>
- Bourdieu, P. (2018). The forms of capital. In *The Sociology of Economic Life, Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780429494338>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- BZN, B. T. H. (2017). Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan: KNg. Soebakti Pesponoto, cetakan ke-14. *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Coleman, J. S. (2009). Social capital in the creation of human capital. In *Knowledge and Social Capital*. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Commission, E. (2002). Globalisierung der Weltwirtschaft– Herausforderungen und Antworten. *Schlussbericht, Drucksache*, 14, 9200.
- Daeng, H. J. M., & Hans, M. (2000). Kebudayaan dan Lingkungan Tinjauan Antropologis. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Dewi, T. K. S. (2009). Transformasi Mitos Dewi Sri dalam Masyarakat Jawa. *Penelitian*). *Jakarta: Program S3 UI*.

- Diplomatique, L. M. (2003). *Atlas der Globalisierung*. Berlin.
- Dona Octavia, Irma Yeny, dan K. L. G. (2020). *Pengelolaan hutan secara partisipatif menuju KPH hijau untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan*. Deepublish.
- Drumm, A., & Moore, A. (2005). Ecotourism Development: A Manual for Conservation Planners and Managers. In *The Nature Conservancy: Vol. 1*. Arlington Virginia.
- Egra, S., Kusuma, I. W., & Arung, E. T. (2018). Kandungan Antioksidan pada Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*). *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 2(2). <https://doi.org/10.32522/ujht.v2i2.1549>
- Ekawati, S., & Nurrochmat, D. R. (2014). Hubungan Modal Sosial Dengan Pemanfaatan Dan Kelestarian Hutan Lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1). <https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.1.40-53>
- Eriksen, T. H. (2001). Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology. *Lace*, 2nd.
- Fadhli, R., Sugianto, S., & Syakur, S. (2021). Analisis Perubahan Penutupan Lahan dan Potensi Karbon di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan, Aceh Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2). <https://doi.org/10.14710/jil.19.2.450-458>
- Faisal, F. (2019). Effectiveness of Forestry Police in Preventing Illegal Logging Activity in North Halmahera Regency. *Papua Law Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.31957/plj.v3i2.785>
- FAO, F. and A. O. of the U. N. (2022). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022*. Rome.
- Fashri, F. (2019). *Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol*. Prgram Studi Doktor Ilmu Sosial UNAIR.

- Fukuyama, F. (1996). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Free Press Paperbacks.
- García-Amado, L. R., Pérez, M. R., Escutia, F. R., García, S. B., & Mejía, E. C. (2011). Efficiency of Payments for Environmental Services: Equity and additionality in a case study from a Biosphere Reserve in Chiapas, Mexico. *Ecological Economics*, 70(12). <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.07.016>
- Grundy, K. J. (1993). Sustainable Development—An Emerging Paradigm. *Proceedings of the Seventeenth Conference, New Zealand Geographical Society Conference*.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). *Ranah= Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hasanah, P., Nugroho, R. A., Mellanium, A. A., & Malangi, O. H. (2022). PENINGKATAN PROMOSI KEBUN BERKAH MELALUI RANCANG BANGUN WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ITK (PIKAT)*, 3(1), 62–70.
- Hasanuddin, W. S. (2010). Keberagaman akar sastra dan transformasi budaya dalam sastra Indonesia [Diversity of literary roots and cultural transformation in Indonesian literature]. *National Seminar “Recent Indonesian Literature: Criticism and Diversity”, Gathering of Indonesian Literature*, 3, 28–31.
- Hidayat, A., Dharmawan, A. H., & Pramudita, D. (2017). Kelayakan usaha budidaya kopi cibulao dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 4(2), 85–95.
- Hijriati, E., & Mardiana, R. (2015). PENGARUH EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKOLOGI,

SOSIAL DAN EKONOMI DI KAMPUNG BATUSUHUNAN, SUKABUMI. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i3.9422>

- Ibrahim, M. (2007). *Mujahid dataran tinggi Gayo* (p. 19). Takengon: YayasanMaqamammah-muda.
- Ilmi, I. (2021). Ekonomi Hijau Sebagai Strategi SMK Bakti Karya Parigi Menghadapi Krisis Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 9–15.
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2022, April 25). *Green Economy Mendorong Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4024/green-economy-mendorong-terciptanya-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan>
- Istarani, F., & Pandebesie, E. S. (2014). Studi Dampak Arsen ( As ) dan Kadmium ( Cd ). *Jurnal Teknik POMITS*, 3(1), 1–6. <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/5684/1685>
- Ivlev, V., & Ivleva, M. (2018). Philosophical foundations of the concept of green economy. *International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Ecological Studies (CESSSES 2018)*, 869–873.
- Jha, V., & Jha, A. (2011). Traditional knowledge on disaster management: A preliminary study of the Lepcha community of Sikkim, India. *Indian Journal of Traditional Knowledge*, 10(1).
- Jones, S. (2005). Community-based ecotourism: The significance of social capital. *Annals of Tourism Research*, 32(2), 303–324.
- Jundiani, & Prajamufti, Y. (2011). KONSEP KONSTITUSI HIJAU (GREEN CONSTITUTION) DALAM KEGIATAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2147>



- Kamil, A. I., Ilham, I., Ikramatoun, S., Meliza, R., & Sjaffruddin, S. (2021). Bur Telege : Etnografi Gerakan Kolektif Masyarakat dalam Membangun Wisata Islami. *Aceh Anthropological Journal*, 5(2), 118. <https://doi.org/10.29103/aaaj.v5i2.5650>
- Keuangan, K. (2021). Ekonomi hijau untuk masa depan peradaban. *Majalah Media Keuangan XIV*, 163.
- Koentjaraningrat. (1993). *Masalah kesukubangsaan dan integrasi nasional*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Lavrinenko, O. V., Petrovskii, V. V., & Lavrinenko, I. A. (2019). New local floras and materials for floristic subdivision of the east European tundra. *Botanicheskii Zhurnal*, 104(1). <https://doi.org/10.1134/S0006813619010083>
- Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, 139. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>
- Lucas, S. R. (2014). Beyond the existence proof: Ontological conditions, epistemological implications, and in-depth interview research. *Quality and Quantity*, 48(1). <https://doi.org/10.1007/s11135-012-9775-3>
- Macnight Ngwese, N., Saito, O., Sato, A., Agyeman Boafo, Y., & Jasaw, G. (2018). Traditional and local knowledge practices for disaster risk reduction in Northern Ghana. *Sustainability*, 10(3), 825.
- Magazine, T. (2006). Special Report Global Warming: 23-37. *April*, 3, 2006.
- Makmun, M. (2016). Green Economy: Konsep, Impelentasi dan Peran Kementerian Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(2), 1–15.

- Manoppo, V. (2020). *Natural Capital, Social Capital, and Physical Capital in Improving the Performance of Ecotourism in Bunaken National Park, Indonesia*. 144(Afbe 2019), 514–520. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200606.087>
- Marcinek, A. A., & Hunt, C. A. (2015). Social capital, ecotourism, and empowerment in Shiripuno, Ecuador. *International Journal of Tourism Anthropology*, 4(4), 327–342.
- Marhamah, M. (2014). Pola Komunikasi dan Stratifikasi dalam Budaya Tutor Masyarakat Gayo. *EI-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 16(2), 255–270.
- MUHAMMAD, A. (2017). Pengaruh Kearifan Lokal Masyarakat Adat Minangkabau Terhadap Kelestarian Hutan Nagari. *Studi Pustaka*.
- Mulyani, A. S. (2021). Pemanasan Global, Penyebab, Dampak dan Antisipasinya. *Artikel Pengabdian Masyarakat*, 1–27.
- Muna, H., Bella, & Rahayu, S. (2021). Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian Di Desa Berawang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. *SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN*, 2(1), 88–91.
- Musavengane, R & Matikiti, R. (2015). Does social capital really enhance community based ecotourism? A review of the literature African Journal of Hospitality. *Tourism and Leisure*, 4(1), 1–18.
- Nashir, H. (2012). Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens. *Sosiologi Reflektif*, 7(1).
- Nasruddin, N., Febrian, G. M. S., Rukmana, A. D., & Indra, M. (2020). Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung (Studi Di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung Kayu Tangi Blok I Kota Banjarbaru). *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 2(2), 228–234.

- Niman, E. M. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106.
- Pelras, C., Abu, A. R., & Arsuka, N. A. (2006). *Manusia Bugis*.
- Permana, R. C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J. (2011). Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15(1), 67–76.
- Pinan, A., & Hakim, A. (1998). Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah). *Aceh Tengah: Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah*.
- Putnam, R. D. (2016). Bowling alone: America's declining social capital. In *Culture and Politics: A Reader*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-62397-6>
- Putri, S. R., Suganda, T. G., & Pramana, S. (2021). Penerapan Bayesian Network dalam Memodelkan Kondisi Ekonomi Hijau Indonesia di Era Pandemi Berdasarkan Big Data. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 1054–1064.
- Rahmaniyah, N. L., & Rokhani, R. (2021). Modal Sosial dalam Pengelolaan Ekowisata Kampung Blekok di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. *Jurnal KIRANA*, 2(2). <https://doi.org/10.19184/jkrn.v2i2.23666>
- Ramón-Hidalgo, A.-E., & Harris, L. M. (2018). Social Capital, political empowerment and social difference: A mixed-methods study of an ecotourism project in the rural Volta region of Ghana. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(12), 2153–2172.
- Rijal, S., Nasri, N., Ardiansyah, T., & A, C. (2020). Potensi Pengembangan Ekowisata Rumbia Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 12(1). <https://doi.org/10.24259/jhm.v12i1.6031>

- Santoso, T. (2020). Memahami Modal Sosial. In *Memahami Modal Sosial*. <http://repository.petra.ac.id/18928/>
- Serambinews. (2022). *Pengelolaan Bur Telege Memotivasi Warga Kelola Potensi Wisata*.
- Sesotyaningtyas, M., & Manaf, A. (2015). Analysis of Sustainable Tourism Village Development at Kutoharjo Village, Kendal Regency of Central Java. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.091>
- Shie, Y.-J. (2020). Indigenous legacy for building resilience: A case study of Taiwanese mountain river ecotourism. *Tourism Management Perspectives*, 33, 100612.
- Situmorang, R. O. (2018). Social Capital in Managing Mangrove Area as Ecotourism by Muara Baimbai Community. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 5(1). <https://doi.org/10.20886/ijfr.2018.5.1.21-34>
- Soemarwoto, O. (2016). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*.
- Sutopo, A., Arthati, D. F., & Rahmi, U. A. (2014). Kajian Indikator Sustainable Development Goals ( SDGs ). *Kajian Indikator Lintas Sektor*, 1–162.
- Torres-Rojo, J. M. (2021). Illegal logging and the productivity trap of timber production in Mexico. *Forests*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/f12070838>
- Umweltbundesamt, G. (2002). *Nachhaltige Entwicklung in Deutschland: die Zukunft dauerhaft umweltgerecht gestalten*. Erich Schmidt.
- UNDP, U. (2002). *Human Development Report 2002: Deepening democracy in a fragmented world*. Oxford University Press New York.

- WCED, W. C. on E. and D. (1987). Our common future. In *Our Common Future*. <https://doi.org/10.4324/9781912281220>
- Wiratma, H. D., & Nurgiyanti, T. (2019). Pembangunan Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep Green Economy dan Blue Economy. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(2), 161–172.
- Wiyekti, N. (2021). Transisi menuju Ekonomi Hijau, Berkaitan dengan Kualitas Lingkungan Era Desentralisasi di Indonesia. *JIKOSTIK: Jurnal Ilmiah Komputasi Dan Statistika*, 1(1).
- Wouden, F. A. E. van. (1985). *Klien, Mitos dan Kekuasaan*. . Jakarta: Grafiti Pers.
- WRI, I. (2000). *Forest Cover Loss in Indonesia, 2000-2005 \_ Hilangnya Tutupan Hutan di Indonesia tahun 2000-2005 \_ WRI Indonesia*.
- Wulandari, C. (2019). Modal Sosial Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Ekowisata di Hutan Lindung. *Jurnal Hutan Tropis*, 7(3), 233–239.
- Yunus, S., Zainal, S., Jalil, F., & Maya Aprita Sari, C. (2020). Correlation of Social Capital and Poverty Farmers in Aceh. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1). <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.813>
- Yusutria, Nefelinda, & Febriana, R. (2018). Local Wisdom Values in Facing Natural Disasters On Module of Geographic Planning Subject Based on Faith. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 10(2), 231–234.
- Wawancara Reje Kampung Hakim Bale Bujang, Misriadi, 2022
- Wawancara Petua Kampung Hakim Bale Bujang, Edi Nauli, 2022
- Wawancara Ketua BUMK Kampung Hakim Bale Bujang, Fauzuluddin, 2022
- Wawancara Pengawas BUMK Kampung Hakim Bale Bujang, Albar Abdullah, 2022

Wawancara Staff KPH Bener Meriah, Edi Azhari, 2022

Wawancara Mantan Kepala UPT. KPH Bener Meriah, Ambia, 2022

Wawancara Budayawan Gayo, Zulfikar Muhammad/Aman Dio, 2022

Wawancara, Anggota MAG Aceh Tengah, M. Joni, 2022



---

## BIODATA PENULIS

---



**Dr. Suadi Zainal, M.Si**, lahir di Mns. Rumpuen Beuracan, Pidie Jaya pada 16 Agustus 1976. Pendidikan doktor diselesaikan di Universitas Sains Malaysia pada tahun 2015 di bidang konflik dan perdamaian. Ditetapkan sebagai dosen sejak 2003 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Di antara karya ilmiah yang telah dihasilkan bersama koleganya adalah; (1) Modal Sosial, Kemiskinan dan Pem-bangunan; (2) Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu; (3) PENDIDIKAN PERDAMAIAN: Model Pembelajaran, Tantangan dan Solusinya; (4) Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi; (5) Integration of Oil Palm and Cattle for Post Conflict Sustainable Development; (6) The Policy of Local Government to Implement Peace Education at Secondary School Post Armed Conflict in Aceh Indonesia; (7) The Urgency of Research and Strengthening Entrepreneurship Policies in Generating Business Models in Ex-Conflict Areas; 8)Traditional Medication–Rajah: The Rational Choice of Aceh People for Recovering Diseases during the Covid-19 Pandemic; (9) The Village Leader as a



Safety-Valve in Resolving Conflict of Shelter Aids Post an Earthquake; dan (10) Why Was “Self-Government” Not Achieved in Aceh? The Challenges of Implementing a Peace Agreement.



**Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR**, lahir di Cadek, Aceh Besar pada 14 Mei 1977. Gelar Doktor Sosiologi diperoleh pada tahun 2011 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini mengabdikan sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Selain mengajar pada program Sarjana dan Magister Sosiologi Universitas Malikussaleh juga aktif mengajar di program pasca sarjana IAIN Lhokseumawe, Aceh. Sebagai peneliti aktif, pelbagai karya publikasi telah dihasilkan baik buku maupun jurnal nasional dan internasional. **Buku, diantaranya;** (1) Ulama dan Politik di Aceh, Menelaah Hubungan Kekuasaan Teungku Dayah dan Negara; dan (2) Masjid dan Inkubasi Konflik: Menelaah Kontestasi Paham Islam Dayah dan Muhammadiyah di Samalanga. **Jurnal, diantaranya;** (1) Aswaja Mobilization and Intolerance: Sub-state ideology, religious vigilantism in Aceh, Indonesia; (2) Teungku Dayah Agency and Religious Social Capital on Drug Eradication in Aceh, Indonesia; (3) From drug center to soka crabs and tilapia salina center: a case study of community economic empowerment at ex-drug base of Ujoeng Pacu Village, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia; (4) Conflict Ahlussunnah Wal Jamaah Versus As-Sunnah in Aceh (Case Study of the Politics of Religious Identity in the Burning of the At-Taqwa Muhammadiyah Mosque in Samalanga, Bireuen-Aceh Province); dan (5) A Study of Cultural Dynamics among Gayo Coffee Farmers, in Indonesia



**Fakhurrrazi, M.Si**, lahir di Reuleut Timu, Kabupaten Aceh Utara pada 16 Juni 1977. Pendidikan S2 diselesaikan pada Program Pascasarjana Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun (2007). Terlibat aktif sebagai pengajar/dosen di Universitas Malikussaleh sejak 2008 hingga sekarang. Di antara karya ilmiah yang telah dihasilkan adalah; (1) Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh Dalam Proses Gencatan senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi di Aceh; (2) Formalisasi Syari'at Islam dan Dominasi Negara Terhadap Elite Agama Islam Tradisional di Aceh; (3) Teungku Dayah and Drug Eradication Agency in Ujoeng Pacu Lhokseumawe–Aceh; (4) Feasibility Strategy on Giving Capital for Salt Farmers in Increasing Economic Productivity Using KNN Classification Model; dan (5) Implementasi Syari'at Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang.